

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI DESA PENARAH KECAMATAN KUNDUR UTARA  
KABUPATEN KARIMUN**



**OLEH:**

**AKHMARUDIN**

**10875004156**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH**  
**KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN**

**OLEH: AKHMARUDIN**  
**NIM: 10875004156**

*Berdasarkan ketentuan pasal 63 peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDes). Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rencana kerja ekonomi Desa.Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan Desa tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pemerintah Kabupaten/Provinsi, Pemerintah Desa dan peran dari masyarakat setempat. Menyusun rencana dan melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa harus didukung oleh hasil sumber daya manusia berserta potensi yang tersedia.Serangkaian kegiatan perumusan dan Strategi yang mungkin dikembangkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna untuk mencapai sasaran pembangunan pedesaan secara Efektif dan Efisien dalam rangka pembangunan Nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dan faktor-faktor yang memperngaruhi perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Penelitianini membahas tentang perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara dan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara ini belum menunjukkan kesejahteraan sosial yang optimal. Hal ini terbukti dari kurang maksimalnya kemampuan perangkat pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik yang tepat sasaran dalam mengawasi perencanaan pembangunan. Setelah melekukan penelitian maka peneliti dapat menemukan faktor-faktor yang memperngaruhi perencanaan pembangunan Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun yaitu: jumlah biaya, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan kapan dimulai dan kapan selesainya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	

<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika penulisan.....	8

<b>BAB II      PEMBAHASAN</b>	
2.1 Perencanaan.....	10
2.2 Pembangunan .....	13
2.3 Perencanaan Pembangunan Desa .....	15
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
2.5 Otonomi Daerah .....	23
2.6 Otonomi Desa.....	25
2.7 Hipotesis.....	29
2.8 Definisi Konsep.....	29

<b>BAB III      MEODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Tempat Penelitian.....	33
3.2 Jenis dan Sumber data .....	33
3.3 Populasi dan Sampel .....	34

3.4 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.5 Analisa Data .....	36
<b>BAB IV      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Karakteristik Desa Penarah .....	37
4.2 Jumlah Penduduk .....	37
4.3 Keadaan penduduk Menurut Umur .....	38
4.4 Mata Pencarian .....	39
4.5 Agama .....	40
4.6 Suku.....	41
4.7 Pendidikan .....	42
4.8 Kepala Desa.....	43
4.9 Sekretaris Desa.....	44
4.10 Kepala Urusan Pembangunan .....	44
4.11 Kepala Urusan pemerintahan .....	44
4.12 Kepala Urusan Umum.....	45
4.13 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat .....	45
4.14 Kepala Dusun .....	45
<b>BAB V      HASIL PENELITIAN</b>	
5.1 Identitas Responden .....	47
5.2 Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Penarah .....	49
5.3 Faktor-faktor yang Memperngaruhi Perencanaan Pembangunan Desa Penarah .....	95
<b>BAB VI      KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAPHY PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1	Konsep Rencana Pembangunan Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Tahun 2011-2015.....	4
1.2	Data Pelaksanaan Pembangunan Desa Penarah Kec. Kundur Utara kab. Karimun Tahun 2011-2012.....	6
IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
IV.2	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	38
IV.3	Klasifikasi Mata pencarian Penduduk Desa Penarah .....	39
IV.4	Klasifikasi Jumlah Penganut Agama Desa Penarah .....	40
IV.5	Klasifikasi Rumah Ibadah di Desa Penarah.....	41
IV.6	Klasifikasi Suku Berdasarkan Jumlah di Desa Penarah .....	41
IV.7	Klasifikasi Pendidikan di Desa Penarah .....	42
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Usia di Desa Penarah .....	47
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Penarah .....	48
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan di Desa Penarah .....	48
V.4	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden di Desa Penarah .....	49
V.5	Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Masyarakat dalam rapat Perencanaan Pemabngunan .....	52
V.6	Tanggapan Responden Tentang keterlibatan Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat Dalam Rapat.....	53
V.7	Tanggapan Responden Tentang Masyarakat yang Selalu mengkritik kalau Arah Perencanaan Pembangunan Tidak Benar.....	54

V.8	Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Gotong Royong.....	56
V.9	Tanggapan Responden dalam Memberikan Bantuan Material Tentang Perencanaan Pemabngunan.....	58
V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Partisipatif Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Penarah.....	59
V.11	Tanggapan Responden Tentang Keberpihakan Perencanaan Pembangunan Terhadap Masyarakat miskin .....	62
V.12	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan yang Memperngaruhi Terhadap Pendapatan Masyarakat .....	64
V.13	Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Pemerintah Desa Selalu Mewakili Aspirasi Masyarakat .....	65
V.14	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan yang Mendukung Ekonomi Masyarakat Miskin.....	66
V.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Penarah Berpihak pada Masyakat, Khususnya Masyarakat Miskin .....	68
V.16	Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap RPJMDes Tahun 2011-2015.....	71
V.17	Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Fisik Desa .....	72
V.18	Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dana yang di Peroleh untuk Perencanaan Pemabangunan Fisik Desa.....	74
V.19	Tanggapan Responden Tentang Jumlah Dana yang dikeluarkan untuk Perencanaan Pembangunan Fisik Desa .....	75

V.20 Rekapitulasi tanggapan Responden Terhadap Keterbukaan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Desa.....	76
V.21 Tanggapan Responden Tentang Ketelitian Pemerintah Desa dalam Membuat Perencanaan Pemabangunan Desa .....	79
V.22 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Sering Datang Kelokasi Perencanaan Pembangunan .....	80
V.23 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Tidak Pernah Melakukan Penyimpangan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan .....	81
V.24 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa selalu Memperbaiki Jika Terjadi Penyimpangan dalam Perencanaan Pembangunan.....	83
V.25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kecermatan Pemerintah Desa dalam Membuat Suatu Perencanaan Pemabngunan .....	84
V.26 Tanggapan Responden Tentang Sarana dan Prasarana di Desa Penarah Memadai .....	86
V.27 Tanggapan Responden Tentang Potensi Pembangunan Desa Penarah memadai dalam Bidang Sarana dan Praasarana kedepanya .....	88
V.28 Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Selalu Tepat Waktu dam Pembuatanya .....	89
V.29 Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Selalu Tepat Waktu dalm Penyelesaiannya.....	90
V.30 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Efektif dan Efisiensi Desa Penarah .....	91
V.31 Rekapitulasi Jawaban Respnden Tentang Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau dan sedikit daratan. Dengan Daerah yang banyak, maka pemerintah memberikan hak otonomi yang kita kenal Otonomi Daerah. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam Otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan UU No.22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan UU No.32/ 2004 sebagai revisi Undang-undang sebelumnya) sampai sekarang. Dalam dua Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut telah diberlakukan sistem Desentralisasi.

Dengan adanya sistem ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di dalam sistem Desentralistik dan Otonomi Daerah, melekat pula kewenangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk secara proaktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan demi kesejahteraan Rakyat. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari salah satu tujuan diberlakukannya Otonomi Daerah.

Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan



pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang Desentralistik dan Demokratis khususnya di Kabupaten Karimun.

Karimun mulai memekarkan wilayahnya untuk menjadi sebuah kabupaten yaitu kabupaten karimun, yang semula sebuah kecamatan. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten karimun, wilayah ini terdiri dari tiga kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Karimun, Moro dan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten karimun dimekarkan menjadi 8 kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur Kota, Kundur Barat, Durai, Moro, Buru dan Kecamatan Kundur Utara.

Kesuksesan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakan pembangunan ditingkat desa, karena Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Desa Penarah merupakan bagian wilayah administratif di Kecamatan Kundur Utara yang sedang berkembang pesat pembangunanya. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Penarah diperlukan organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat agar masyarakat desa penarah mau berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang ada di Desa Penarah dapat berjalan secara rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Wibowo(2004: 55), mengemukakan bahwa dalam pembuatan suatu perencanaan pembangunan harus mengikut sertakan secara aktif setiap warga Negara atau kelompok masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang tujuanya untuk mengatur kehidupan bersama.

Pembangunan desa akan berjalan optimal apabila program yang dibuat bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berupa pendapatan, peningkatan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkadilan.

Maka dari itu perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan peran dari masyarakat memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat desa nya. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang

dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu.

Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan Desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan diDesa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka.

Dibawah ini dapat dilihat konsep perencanaan pembangunan Desa di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dari tahun 2011-2015:

**Table 1.1: Konsep Rencana Pembangunan Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun 2011-2015**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah
<b>Tahun 2011</b>			
1	Penimbunan Lapangan Bola Kaki	Dusun II	110X80 M
2	Pembangunan MCK	Dusun I s/d III	2 Unit
3	Pengadaan Tenda Desa	Desa Penarah	6 Unit
4	Pengadaan Saund Sistem Mesjid	Dusuns I s/d III	6 Unit
5	Semenisasi Jalan	Dusun II	80X3 M
6	Rumah Tak Layak Huni	Desa Penarah	70 Rumah
7	Pembangunan Posyandu	Dusun I dan Dusun III	2 Unit
<b>2012</b>			
1	Labor SMA N6 Kundur	RT.04/RW.01	1 Unit
2	Pemerataan halaman SMA N6 Kundur	Desa Penarah	200 M
3	Semenisasi Jalan Sungai Mata	RT.01-RT.02/RW.01	1200X2
4	Pembangunan Pagar Mesjid	Desa Penarah	6 Unit

5	Pembangunan gedung TPQ	Desa Penarah	4 Unit
6	Pembangunan Pasar Desa	Desa Penarah	1 Unit
7	Pembangunan pagar Kantor Desa	Desa Penarah	1 Unit
	<b>2013</b>		
1	Pengadaan Bibit kambing	Desa Penarah	100 Ekor
2	Pengadaan Bibit Sapi	Desa Penarah	50 Ekor
3	Rehabilitas Perumahan Guru SD	Desa Penarah	3 Unit
4	Pembangunan Rumah Guru SMP N3	Desa Penarah	3 Unit
5	Pemerajaan Kelapa	Desa Penarah	200 Ha
6	Pemerajaan Pohon Sagu	Desa Penarah	150 Ha
	<b>2014</b>		
1	Pembangunan Batu Miring SMA N6 K	Desa Penarah	400 M
2	Pengadaan Pompong Nelayan	Desa Penarah	20 Unit
3	Pembangunan Perpustakaan SMA N6 K	Desa Penarah	1 Unit
4	Pengadaan Buku Paket SMA N6 K	Desa Penarah	300 Buah
5	Pengadaan Beasiswa SMA N6 K	Desa Penarah	300 Siswa
6	Penambahan Jaringan PLN	Desa Penarah	2 Dusun
7	Pengadaan Sumur Bor	Desa Penarah	5 Buah
8	Pengadaan Seragam Kompang	Desa Penarah	3 Kelompok
	<b>2015</b>		
1	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Penarah	1 Unit
2	Pengadaan Buku Bacaan Santri	Desa Penarah	20 Orang
3	Pembangunan Gedung PKK	Desa Penarah	1 Unit
4	Pembangunan Pagar Kuburan	Desa Penarah	5 Buah
5	Pembangunan Pagar SD N 008	Desa Penarah	300 M
6	Pembuatan Papan Nama Mesjid	Desa Penarah	3 Mesjid

**Sumber: Kantor Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun 2012**

Pada tabel diatas dapat dilihat konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes)pada Tahun 2011-2015 di Desa Penarah Kecamatan

Kundur Utara Kabupaten Karimun. Kalau dipandang atau dilihat dari segi perencanaan pembangunan ini sangat banyak sekali rencana pembangunan yang dibuat oleh aparat desa, sehingga menyebabkan banyak perencanaan pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik.

Beberapa fenomena yang penulis temukan di lokasi penelitian bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, diantaranya adalah:

1. Dana yang tidak sesuai dengan pembangunan. Dengan banyaknya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat Desa Penarah sehingga menyebabkan kesulitan dana yang diperoleh tidak cukup untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat.
2. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat terhadap dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan. Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan.
3. Pembangunan yang tidak tepat sesuai dengan rencana, baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.

Dibawah ini dapat dilihat realisasi dari hasil perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dari tahun 2011-2012 sebagai berikut :

**Table 1.2: Data pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Tahun Anggaran 2011-2012**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Dana		Ket
				Pemerintah	Masyarakat	
	<b>Tahun 2011</b>					
1	Penimbunan Lapangan Bola Kaki	110X80	Dusun II	Rp.2.850.000	Rp.---	Terealisasi
2	Pembangunan MCK	11 Unit	Dusun I s/d III	Rp.50.000.000	Rp.----	Terealisasi
3	Pengadaan Tenda Desa	6 Unit	Desa Penarah	Rp.30.000.000	Rp.---	Terealisasi
4	Pengadaan Saund Sistem Mesjid	6 Unit	Dusun I s/d III	Rp.66.500.000	Rp.---	Terealisasi
5	Semenisasi jalan	80 X 3 M	Dusun II	Rp.100.000.000		
6	Rumah Tak layak Huni	70 Rumah	Desa Penarah	Rp.1400.000.000	Rp.-----	Belum Terealisasi
7	Pembangunan Posyandu	2 unit	Dusun I dan II	Rp.80.000.000	Rp.-----	Belum Terealisasi
8	Pembangunan Balai Pelatihan	1 Unit	Desa Penarah	Rp.84.600.000	Rp.-----	Belum Terealisasi
	<b>Tahun 2012</b>					
1	Labor SMA N6 Kundur	1 Unit	RT.04/RW.01	Rp.120.000.000	Rp.-----	Terealisasi
2	Pemerataan halaman SMA N6 Kundur	200 M	Desa Penarah	Rp.20.000.000	Rp.-----	Terealisasi
3	Semenisasi Jalan Sungai Mata	1200X2	RT.01-RT.02/RW.01	Rp.141.000.000	Rp.---	Terealisasi
4	Pembangunan Pagar Mesjid	6 Unit	Desa Penarah	Rp.148.400.000	Rp.----	Terealisasi
5	Pembangunan gedung TPQ	4 Unit	Desa Penarah	Rp.141.000.000	Rp.---	Belum Terealisasi
6	Pembangunan Pasar Desa	1 Unit	Desa Penarah	Rp.200.000.000	Rp.---	Belum Terealisasi
7	Pembangunan pagar Kantor Desa	1 Unit	Desa Penarah	Rp.73.500.000	Rp.----	Belum Terealisasi

**Sumber: Kantor Desa Penarah 2012**

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, keberhasilan suatu pembangunan fisik dapat dilihat pada dua tahun belakang, yaitu 2011 terdapat 8 perencanaan pembangunan, sedangkan 2012 terdapat 7 perencanaan pembangunan, tetapi dua tahun belakang ini ada 6 perencanaan pembangunan di Desa Penarah yang belum terealisasi

dengan baik karena keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari peran kita semua baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan fenomena–fenomena diatas, maka saya selaku penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:”Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimanakah proses perencanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang memperngaruhi Perencanaan Pembangunan Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Uatara Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks penelitian yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Telaah Pustaka**

Adapun isi dari Bab ini adalah beberapa pengertian yang menunjang dari penelitian ini yang bersumber dari berbagai literatur seperti pengertian perencanaan, unsur-unsur perencanaan, pengertian pembangunan, pengertian Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan hipotesa

#### **Bab III Metode Penelitian**

Pada Bab ini membahas tentang lokasi dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisa data.

#### **Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian**



Pada Bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai Desa PenarahKec. Kundur Utara yang meliputi karakteristik Desa Penarah dari keadaan geografis, agama, pendidikan, dan sumber mata pencarian masyarakat Desa Penarah.

## **Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Terdiri dari jawaban responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan, kesanggupan pemimpin dan jawaban responden tentang keberhasilan pembangunan yang terdiri dari partisipatif masyarakat, berpihak pada masyarakat, terbuka, cermat dan efisiensi dan efektif.

## **Bab VI Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dan saran untuk pembangunan Desa Penarah yang akan datang. Agar perencanaan pembangunan bisa berhasil guna bagi masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Perencanaan

Menurut Mahduh M. Hanafi (2004 : 2) perencanaan adalah suatu proses yang mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi.

Dari definisi diatas yang dikemukakan oleh Mahduh M. Hanafi dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang direncanakan. Dengan melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur, mengendalikan dan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan.

Suatu perencanaan dalam hadits Nabi diistilahkan dengan *menyiapkan bekal*, Sebagaiman pesan Nabi kepada shahabat Abi Dzar ; “ Perkokohlah bahtera karena lautan itu dalam, artinya *Perbanyaklah bekal karena perjalanan itu panjang*”. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ جُرْغُومٌ مُّشْنُونَ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٧﴾

Artinya *“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?”* ( Surat At-Tiin, ayat : 4-7 )

Selain itu dalam ayat lain juga dikatakan:

Artinya” *hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)”*.(Al-Hasyr ayat 18)

Perencanaan merupakan sebuah keharusan. Segala sesuatu itu membutuhkan rencana, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.”* (HR. Ibnu Mubarak)

H. D Van Wijk (2006: 45) perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijaksanaan. Dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses kebijaksanaan.

Menurut P. de Haan dan kawan-kawan (2006: 55) konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.

Menurut Manullang (2004: 45), mengatakan bahwa untuk membuat suatu rencana ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah:

1. Menetapkan tugas dan tujuan.

Maksudnya tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas dan tindakan yang akan dilaksanakan.

2. Mengobservasi dan menganalisis.

Maksudnya keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh organisasi harus dianalisa dengan tujuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Hal ini sangat penting agar rencana yang disusun realistis dan objektif.

3. Membuat kemungkinan-kemungkinan

Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang muncul perlu diidentifikasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang luas tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana yang disusun dapat mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

4. Menyusun rencana.

Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal ini agar organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah mana hasil yang ingin dicapai dari sebuah aktivitasnya.

*Dari berbagai penjelasan ayat Al-Quran, Hadis Nabi Muhamad SAW dan teori para ahli diatas, maka dapat penulis jabarkan bahwa Dengan melakukan perencanaan yang matang maka kemungkinan-kemungkinan atau akibat yang tidak diinginkan ketika melakukan sesuatu pekerjaan dapat diminimalisir. Karena perencanaan yang produktif merupakan syarat bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan yang optimal. Dalam kerangka ini, maka perencanaan dalam suatu pekerjaan yang matang harus memperhatikan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, sehingga aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.*

Selain itu juga Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke mana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dalam setiap langkah gerak, manusia harus introspeksi memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus dalam kesesatan.

## **2.2 Pembangunan**

Definisi pembangunan menurut (Sondang P Siagian: 2005) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari definisi menurut Sondang P Siagian, dapat penulis artikan bahwa pembangunan merupakan arah untuk menuju modernitas. Modernitas disini maksudnya tentang bagaimana cara hidupnya yang baru dan lebih baik dari pada yang sebelumnya. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa konsep dari modernitas tidak hanya identik dengan gaya hidup orang barat. Setiap bangsa dan Negara harus mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai leluhur oleh bangsa yang bersangkutan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Haryono Sudiramunawar, 2002: 15 ).

Mustopodijoyo mengatakan proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintah yang dianut dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor diataranya:

1. Idiologi dan pandangan hidup bangsa dan Negara yang bersangkutan.
2. Kebudayaan dan kebiasaan hidup didalam masyarakat bersangkutan.
3. Tingkat kemajuan sosial ekonomiyang telah dicapai bangsa tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan Ekonomi, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.

Sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat dipedesaan.

Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma dalam kehidupan masyarakat di pedesaan.

Islam memaparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”*(QS al-Baqarah:11-12).

Dari penjelasan dan Firman Allah SWT diatas dapat penulis jabarkan bahwa akibat dari keingkaran, keserakahan dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia yang mengancam kehidupan bumi seperti yang terjadi

pada saat ini yaitu pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, pencemaran udara dan lain-lain.

### **2.3 Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desamemegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir perencanaan pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.



Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dijelaskan pada BAB VI tentang perencanaan pembangunan Desa pasal 63 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- c. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa.

Menurut UU No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu rencana pembangunan berdasarkan:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Desa Dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri

rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material.

- c. Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa.
- d. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah Desa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

- i. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik.
- k. Penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Menurut Soewito MD, SH. (2007 : 184) hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan Desa adalah :

- a. Tersedianya data dan informasi selengkapanya yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan tentang Desa yang bersangkutan yang mencakup tentang :
  - 1. Penyelenggaraan pemerintah Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintah dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

2. Organisasi tata laksana pemerintah Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan kemitraan pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
  4. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana, dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
  5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan Desa melalui media/pengumuman resmi dan meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
- b. Tersedianya peta Desa yang lengkap yang menggambarkan Desa dari segi:
1. Wilayah administrasi pemerintah Desa.
  2. Peta potensial Desa.
  3. Peta yang menggambarkan kondisi kependudukan.
  4. Analisa data, keadaan Desa dan permasalahan Desa.
  5. Tokoh pemuda, tenaga ahli, kader pembangunan Desa dan lain sebagainya.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dapat dilihat pada surat keputusan Kepala Desa No. 03 Tahun 2010 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai berikut:

1. Menetapkan Karyanto sebagai Sekretaris sebagai tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Penarah.
2. Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota harus memahami fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk dan panduan yang telah ditetapkan.
3. Tim penyusun bertugas mulai dari pengkajian permasalahan, kebutuhan dan potensi Desa, mengadakan musyawarah untuk menyusun rencana pembangunan dan hasil yang telah disepakati.
4. Rencana pembangunan Desa disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan mengsingronkan kegiatan PNPM, PWPM dan lain-lain.
5. Masa kerja tim penyusun 3 bulan terhitung sejak diterbitkan surat ini.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa perencanaan merupakan hasil dari kegiatan atau program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukan bagi

masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan Ekonomi dan politik.

Perencanaan pembangunan yang partisipatif, terbuka, bepihak, cermat, efesiensi dan efektif pada masyarakat dan berkelanjutan memiliki peranyang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena perencanaan pembangunan Desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan dalam suatu pembangunan

Jadi sudah jelas bahwa yang paling diutamakan dalam perencanaan pembangunan Desa adalah Pemerintah Desa, biar bagaimanapun dalam menentukan pembangunan, pemerintah Desa sebagai haluan dalam melaksanakan pembangunan. Karena perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga masyarakat bersama kepala Desa akan menentukan suatu pembangunan dan kemajuan Desa. Maka barulah dilakukan suatu usaha dalam menggalang kekuatan untuk perencanaan pembangunan Desa sehingga didalam pembangunan dapat dijalankan dengan baik serta bisa berkembang secara teratur.

#### **2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Desa**

Berdasarkan ketentuan pasal 63 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 Tahun yang membuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana

kerja. Selanjutnya yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya yang disingkat dengan (RKPDesa) adalah dokumen untuk perencanaan untuk priode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan karangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan karangka pembinaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 56) keberhasilan pembangunan pada masyarakat Desa dapat dilihat dari :

- a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
- b. Waktu pelaksanaanya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
- c. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Gibson agar perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar harus memiliki misi, tujuan dan sasaran. Disini penulis akan menjeaskan satu persatu definisi tersebut yang dikemukakan oleg Gibson.

1. Misi adalah tujuan akhir suatu organisasi.
2. Tujuan adalah kondisi atau keadaan jangka panjang, yang bila dicapai akan membantu misi organisasi.
3. Sasaran rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu tahun.

## 2.5 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasan dalam UUD 1945 antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik”

- b. Pasal 18 yang menyatakan:

“Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan mengganti dasar musyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak dan asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Didasari bahwa hakekat Otonomi, pengarahan maupun prinsipnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, walaupun dituangkan dalam UUD No. 5 Tahun 1974 belum sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar. Namun dari hasil kemajuan penyelenggaraan Otonomi tersebut minimal telah dapat diwujudkan di Dati I dan Dati II yang tentu saja intensitas dan bobotnya masih terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang tentunya sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan masing-masing Daerah.

Disamping itu apabila dikaji dalam undang-undang No. 5 tahun 1974 maka pengertian Otonomi Daerah bagi suatu daerah tersebut harus mampu :

- a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana pelaksanaannya).
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang Qualified.



- c. Membuat Perda sendiri.
- d. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi dan usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian diatas tersebut jelaslah bahwa dengan Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah secara efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan, Otonomi Daerah juga merupakan keterkaitan yang kuat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dalam sampul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.6 Otonomi Desa**

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut Otonomi Desa. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Pengertian Desa menurut Yuliarti ( dalam Wasistono, 2006: 7 ) ialah tempat asal, tempat tinggal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Bintoro ( dalam Wasistiono, 2006 : 8 ) yang memandang Desa dari geografi, mendefinisikan Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan Daerah lain.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, menurut Suhartono ( dalam Wasistono, 2006 : 13 ) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Dari berbagai pengertian Desa diatas, maka dapat ditarik ciri-ciri Desa secara umum :

1. Desa pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha Tani ( sudut pandang ekonomi ).
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan yang dominan.
3. Tidak seperti di Kota-kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang dari populasi Desa.

4. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga Desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 (12), Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2001 pasal 5 tentang pedoman umum peraturan mengenai Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah berdasar hak asal-usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2004 pasal 14 tentang Desa adalah:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintah dan kemasyarakatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut HAW. Widjaja (2003:165) otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa.

Dari pengertian diatas dikaitkan dengan pembangunan Desa dapat diambil suatu pengertian bahwa pembangunan Desa merupakan proses perubahan yang terus-menerus berlangsung pada masyarakat Desa yang mana merupakan

rangkaian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Bangsa.

Pembangunan Desa Penarah di wilayah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Mempunyai makna yang hakiki bagi rakyat Indonesia, karena menyentuh segenap lapisan melalui pembangunan yang komprehensif. menyebar luas keseluruh pedesaan dan menggali dan menggerakkan partisipasinya berusaha memandukan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan juga dilaksanakan dalam keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat.

## **2.7 Hipotesis**

Menurut S. Margono(Nurul zuriah:37:2009) hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Hipotesis akan ditolak jika palsu dan akan diterima jika fakta membenarkanya. Penerimaan dan penolakan hipotesis sangat tergantung kepada hasil penelitian terhadap fakta yang dikumpulkan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

## **2.8 Definisi Konsep**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah–istilah yang digunakan dan memudahkan dalam menganalisa data agar permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan definisi konsep. Menurut Singarimbun dan Sofian Efendi, definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial atau alami. Pentingnya definisi konsep ditegaskan pula lebih lanjut oleh Kuntjaraningrat, definisi konsep merupakan definisi yang perlu diamati, karena konsep menentukan adanya hubungan empiris.

Dari uraian diatas, maka penulis menguraikan definisi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dalam penelitian ini adalah Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun.
2. Otonomi Desa adalah kewenangan pemerintah Desa yang bersifat murni, berupa hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai budaya (kebiasaan, norma-norma dan aturan) yang tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
3. Perencanaan adalah penyusunan program kegiatan atau program kerja dan target sasaran yang ingin dicapai dan penetapan jadwal pelaksanaan

program kegiatan atau program kerja yang mengatur pelaksanaan pembangunan, di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun.

4. Pembangunan Desa adalah suatu tugas yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepenghuluan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Penarah dan dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara bertahap dan berkesinambungan.
5. Perencanaan pembangunan Desa adalah penyusunan suatu program kegiatan atau kerja yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepenghuluan atau aparaturnya Desa Penarah dengan mengikut sertakan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian dari perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Desa Penarah Dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material
- b. Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan

ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Penarah.

- c. Terbuka merupakan proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penarah.
- d. Cermat merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
- e. Efisiensi dan efektif, yaitu mempunyai makna bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepanya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1.1 Lokasi Tempat Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

#### **1.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran questioner dengan responden tentang pendapatnya atau tenggapannya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atas pembangunan dan keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan tersebut.

##### **b. Data sekunder**

Yaitu data yang sudah di publikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Jumlah penduduk.
- b. Struktur organisasi.
- c. Luas wilayah.
- d. Mata Pencarian.

#### **1.3 Populasi Dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa yang berjumlah 1620 jiwa. Dan Aparat Pemerintah Desa (kepala Desa dan Perangkat Desa) yang berjumlah 6 orang di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka saya sebagai peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada, karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil melalui populasi.

Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi, penulis menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat memperngaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus slovin tersebut adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

#### **Keterangan:**

n = Jumlah Sampel.

N = Besar Populasi.

e = Nilai kritis ( batas ketelitian ) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidak ketelitian karena kesalaha penarikan sampel besar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1620}{1 + 1620(10\%)^2}$$

$$n = \frac{1620}{1 + 1620(0,01)}$$

$$n = \frac{1620}{1 + 16,2}$$

$$n = \frac{1620}{17,2}$$

$$n = 94,19$$

$$n = 94$$

Jadi perhitungan jumlah populasi masyarakat sebesar 1620 jiwa dengan jumlah kelonggaraan 10% maka dari perhitungan dengan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 94.19 jiwa yang dibulatkan menjadi 94 jiwa.

#### **1.4 Metode Pengumpulan Data**

Adapun yang digunakan peneliti dalam metode pengumpulan data adalah dengan cara:

##### **a. Angket**

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis, yang berkaitan dengan variabel penelitian yang kemudian disebarakan kepada masyarakat dan pegawai Desa Penarah.

##### **b. Wawancara**

Yaitu berupa Tanya jawab langsung dengan responden yang bertujuan untuk memperoleh Data atau informasi yang relevan. Dengan penelitian ini dimana dengan dilakukan dengan tatap muka.

#### **1.5 Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpulkan, maka data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan serta dianalisis baik secara kualitatif, kemudian data dianalisa secara deskriptiflalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah prencanaan pembangunan Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun,kemudian diambil dalam suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Karakteristik Desa Penarah**

Desa Penarah adalah Desa yang berada di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Desa Penarah merupakan salah satu dari 8 Desa di Wilayah Kecamatan Kundur Utara yang terletak lebih kurang 10 Km ke arah Timur dari Kecamatan Kundur Utara. Desa Penarah mempunyai luas wilayah seluas 2600 HA. Batas wilayah Desa Penarah sebelah utara berbatasan dengan Buru yang berkecamatan Buru, sebelah selatan berbatasan dengan Lebu yang berkecamatan Kundur utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Durian yang berkecamatan Moro dan sebelah barat berbatasan dengan Sebele yang berkecamatan Kundur Utara.

Iklim di Desa Penarah, sebagai mana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Jumlah bulan hujan 4 bulan dengan suhu rata-rata 27 derajat celcius. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara.

#### **4.2 Jumlah Penduduk**

**Tabel IV.I: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Laki-laki	859
<b>2</b>	Perempuan	761
	<b>Jumlah</b>	<b>1620</b>

**Sumber: Kantor Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun 2012**

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jumlah penduduk dari kaum Laki-laki yang berjumlah 859 jiwa, sedangkan jumlah kaum perempuan 761 jiwa.

Berikut tabel keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### 4.3 Keadaan penduduk menurut umur

**Tabel IV.2: Keadaan penduduk menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-6 Tahun	162 Orang
2	7-12 Tahun	146 Orang
3	13-15 Tahun	168 Orang
4	16-18 Tahun	58 Orang
5	19-60 Tahun	752 Orang
6	61 tahun keatas	334 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1620 Orang</b>

**Sumber:** *Kantor Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun 2012*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun. Kelompok 0-6 Tahun dengan jumlah 162 jiwa. Kelompok umur yang kedua diikuti dari tahun 7-12 berjumlah 146 jiwa. Kelompok umur yang ketiga dari tahun 13-15 berjumlah 168 jiwa. Seterusnya kelompok yang keempat diikuti dari umur 16-18 tahun berjumlah 58 jiwa. Kelompok umur yang kelima diikuti dari tahun 19-60 berjumlah 752 jiwa. Dan kelompok umur yang terakhir 61 tahun keatas berjumlah 334 jiwa.

Jadi perbandingan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur yang dimulai dari tahun 16-18 Tahun yang berjumlah 58 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang banyak adalah kelompok umur yang dimulai dari tahun 19-60 Tahun yang berjumlah 752 jiwa.

#### 4.4 Mata Pencarian

Karena Desa Penarah merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai Petani, buruh tani, pengrajin rumah tangga,

Nelayan, PNS, montir dan Wiraswasta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Klasifikasi mata pencarian penduduk di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Petani	478 Orang	216 Orang
2	Buruh Tani	95 Orang	36 Orang
3	Pengerajin Industri Rumah Tangga	2 Orang	80 Orang
4	Nelayan	75 Orang	-
5	Peternak	51 Orang	-
6	PNS	10 Orang	4 Orang
7	Montir	5 Orang	-
8	Perawat Swasta	1 Orang	1 Orang
9	POLRI	1 Orang	-
10	Bidan Swasta	-	1 Orang
11	Dukun Kampung Terlatih	-	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>718 Orang</b>	<b>339 Orang</b>

**Sumber: Desa Penarah 2012**

Dari tabel IV.3 diatas dapat kita ketahui bahwa mata pencarian masyarakat Desa Penarah di Dominasi oleh petani yaitu laki-laki berjumlah 478 orang, sedangkan perempuan berjumlah 216 orang. Dan yang ke dua diikuti oleh kalangan buruh tani yaitu laki-laki berjumlah 95 orang, sedangkan perempuan berjumlah 36 orang. Ketiga diikuti oleh kalangan pengrajin industri rumah tangga laki-laki berjumlah 2 orang dan perempuan berjumlah 80 orang. Yang keempat diikuti oleh kalangan nelayan yaitu laki-laki berjumlah 75 orang. Yang kelima diikuti oleh kalangan perternak dimana laki-laki berjumlah 51 orang. Kemudian yang keenam diikuti oleh kalangan PNS laki-laki berjumlah 10 orang dan perempuan berjumlah 4 orang. Adapun mata pencarian yang paling kecil dalam tabel diatas adalah perawat swasta laki-laki berjumlah 1 orang dan perempuan

berjumlah 1 orang, kemudian POLRI berjumlah 1 orang laki-laki, kemudian bidan swasta dan dukun kampung terlatih hanya 1 orang yaitu perempuan.

#### 4.5 Agama

Untuk berikutnya di Desa Penarah terdiri dari beberapa penganut Agama.

Untuk mengetahui lebih jelas hal ini dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

**Tabel IV.4**

**Klasifikasi jumlah penganut Agama Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	832 Orang	759 Orang
2	Kristen protestan	1 Orang	-
3	Budha	5 Orang	2 Orang
4	Hindu	-	-
5	Kristen Khatolik	-	-
6	Aliran Kepercayaan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>838 Orang</b>	<b>761 Orang</b>

**Sumber: Desa Penarah 2012**

Berdasarkan pada tabel IV.4 diatas Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara yang jumlah penduduknya 1620 jiwa, dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang beragama Islam sebanyak 832 orang sedangkan perempuan berjumlah 759 orang. Laki-laki yang beragama Kristen Protestan sebanyak 1 orang sedangkan perempuan yang beragama Kristen protestan tidak ada. yang beragama Budha laki-laki berjumlah 5 orang dan yang perempuan berjumlah 2 orang. Untuk yang penganut agama Hindu, Khatolik dan aliran kepercayaan lainyadi Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara masih belum ada.

Untuk berikutnya di Desa Penarah mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini:

**Tabel IV.5**

**Klasifikasi Rumah Ibadah di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2 Buah
2	Mishola	4 Buah
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
<b>Jumlah</b>		<b>6 Buah</b>

**Sumber: Desa Penarah 2012**

Dari tabel IV.4 diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah Rumah Ibadah di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara berjumlah 6 buah dan keseluruhanya merupakan Rumah Ibadah umat Muslim, sementara untuk Rumah Ibadah Non Muslim belum ada satu pun di Desa Penarah.

#### **4.6 Suku**

Untuk berikutnya di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa Suku. Untuk mengetahui lebih jelas hal ini dapat dilihat pada tabel IV.5

**Tabel IV.6**

**Klasifikasi Suku berdasarkan jumlah di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara**

No	Suku	Laki-laki	Perempuan
1	Melayu	838 Orang	752 Orang
2	China	5 Orang	7 Orang
3	Jawa	10 Orang	1 Orang
4	Sumbawa	4 Orang	-
5	Batak	2 Orang	-
6	Sunda	-	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>859 Orang</b>	<b>761 Orang</b>

**Sumber: Desa Penarah 2012**

Dari tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah suku yang paling besar di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun adalah suku Melayu dimana laki-laki berjumlah 838 orang sedangkan perempuan



berjumlah 752 orang. Sementara untuk suku China laki-laki berjumlah 5 orang sedangkan perempuan berjumlah 7 orang. Untuk Suku Jawa laki-laki berjumlah 10 orang, perempuan berjumlah 1 orang. Suku Sumbawa hanya 4 orang laki-laki. Suku Batak Laki-laki hanya 2 orang dan yang terakhir adalah suku Sunda hanya 1 orang perempuan saja.

#### 4.7 Pendidikan

Pendidikan berfungsi sebagai pembantu pengembang kemampuan berfikir dan berbuat serta meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia didalam kehidupan sosial Masyarakat , selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai penunjang keberhasilan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih jelas tentang klasifikasi pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara, dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut ini:

**Tabel IV.7**  
**Klasifikasi Pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	5 Orang	8 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	12 Orang	10 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	12 Orang	10 Orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	146 Orang	157 Orang
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	20 Orang	41 Orang
6	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat SD/Sederajat	353 Orang	232 Orang
7	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	28 Orang	19 Orang
8	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	39 Orang	12 Orang
9	Tamat SMP/Sederajat	134 Orang	156 Orang
10	Tamat SMA/Sederajat	57 Orang	73 Orang
11	Tamat D-1	1 Orang	-
12	Tamat D-2	3 Orang	7 Orang
13	Tamat S-1	7 Orang	4 Orang
14	Tamat S-2	1 Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>834 Orang</b>	<b>746 Orang</b>

**Sumber: Desa Penarah 2012**

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan yang ada di Desa Penarah masih begitu lemah hal ini dapat dilihat dari usia 3-6 tahun yang belum masuk TK laki-laki 5 orang, perempuan 8 orang. Usia 7-18 tahun yang belum pernah sekolah laki-laki berjumlah 12 orang sedangkan perempuan 10 orang. Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah laki-laki berjumlah 20 orang perempuan 41 orang. Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat laki-laki berjumlah 353 oarng sedangkan wanita berjumlah 232 orang. Jumlah usia 12-56 tahun yang tidak tamat SMP laki-laki berjumlah 28 orang perempuan 19 orang. Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA laki-laki berjumlah 39 orang wanita 12 orang.

#### **4.8 Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Di Desa Penarah dijabat oleh kepala Desa bernama Bapak Saharudin. Kepala Desa Penarah dipilih langsung melalui pemilihan kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat.

Adapun masa jabatan kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **4.9 Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa Penarah mempunyai tugas meliputi:

1. Mengurus Administrasi Kantor Desa Penarah.
2. Membantu laporan Administrasi kantor Desa Penarah.
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

#### **4.10 Kepala Urusan Pembangunan**

Adapun yang menjadi tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi:

1. Mengurus Administrasi Keuangan.
2. Mengelola pembukuan keuangan.
3. Mengelola membayar gaji Insentif TAPD.
4. Membuat laporan keuangan.
5. Mengarsifkan dan mencatat surat masuk dan surat keluar .
6. Mengurus pembantuan Akte Kelahiran.
7. Mengelola data Raskin dan Miskin.
8. Mengelola data pertanian dan perikanan.

#### **4.11 Kepala Urusan Pemerintahan**

Adapun yang menjadi tugas dari Kepala Urusan Pemerintahan meliputi:

1. Mengelola data Profil Desa.
2. Mengurus pembuatan Surat Tanah Desa Penarah.
3. Mencatat barang Inventaris Aset Desa Penarah.
4. Mengurus Surat pindah.
5. Mengelola data penduduk.
6. Mengurus laporan dan pembayaran SPPT.
7. Surat SKCK/SKKb.
8. Data pemilu.

#### **4.12 Kepala Urusan Umum**

Adapun yang menjadi tugas dari kepala urusan umum meliputi:

1. Mengurus surat keterangan berpergian/Domosili.

2. Laporan Posyandu.
3. Mencatat kearsipan KK.
4. Regester kelahiran dan kematian.

#### **4.13 Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat**

Adapun yang menjadi tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

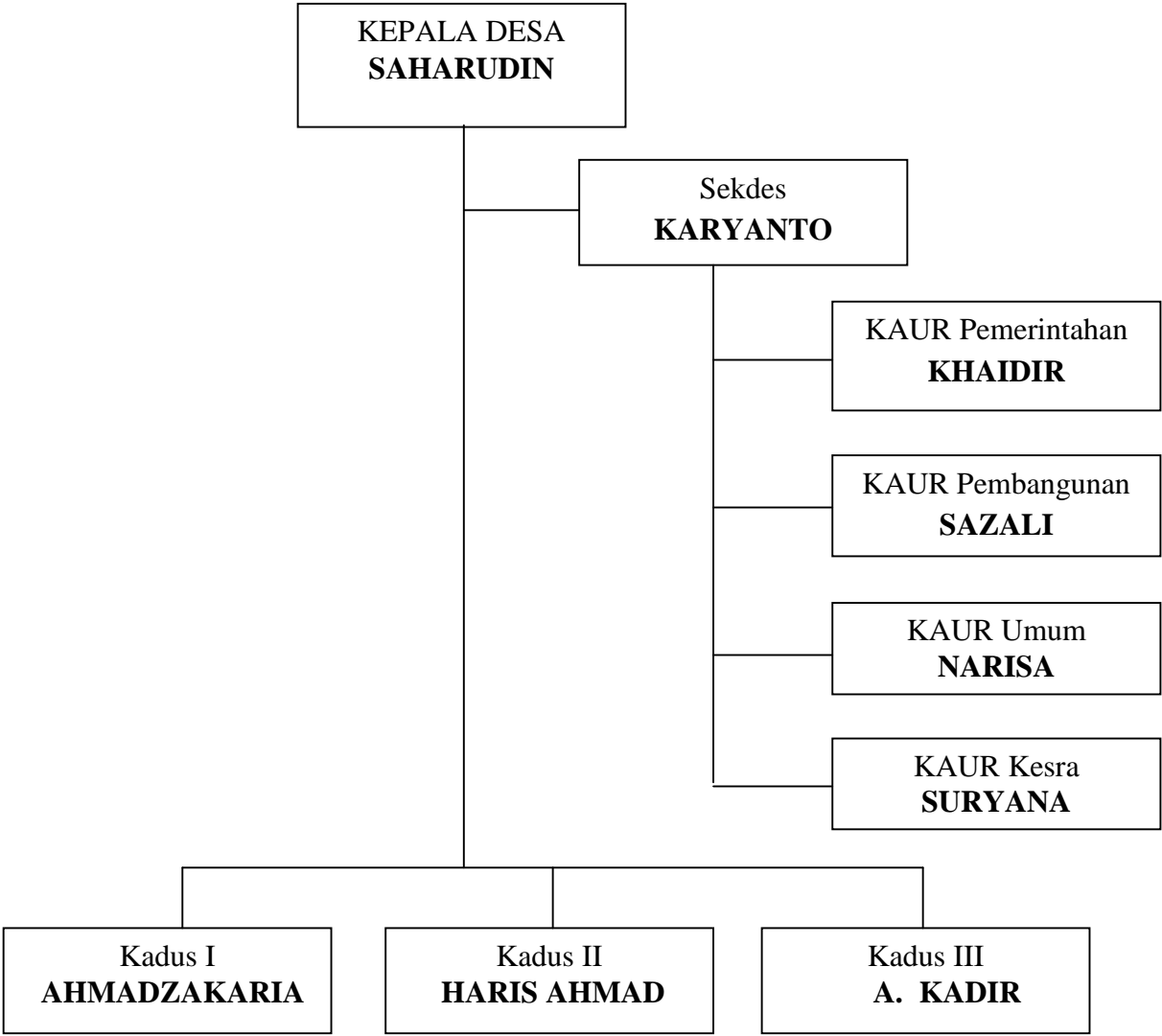
1. Regester KTP/KK.
2. Pengelola KB Desa Penarah.

#### **4.14Kepala Dusun**

Adapun yang menjadi tugas Kepala Dusun yaitu:

1. Mengurus lingkungan masing-masing.
2. Memberikan segala informasi dan menggerakkan Masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan.
3. Memberikan pelayanan dan perencanaan.

**Struktur organisasi Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**



**Sumber: Kantor Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Identitas Responden**

Responden adalah jumlah masarakat yang mempunyai hak untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang berjumlah 1620 jiwa tahun 2011, namun yang diambil sebagai sampel dengan perhitungan menggunakan Rumus Slovin(dalam Husein Umar:2004:146) yaitu sebanyak 95 responden dan di tambah dengan 6 orang aparatur Desa Penarah, jadi semuanya ada 101 responden. Berikut penulis jelaskan mengenai identitas responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan responden.

**Tabel V.I: Identitas Responden berdasarkan usia di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

<b>Umur Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase(%)</b>
20-30 Tahun	38	40,43%
31-40 Tahun	31	32,98%
41-50 Tahun	16	17,02%
51 Tahun	9	9,57%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data olahan hasil penelitian 2012**

Dari Tabel V.I diatas dapat terlihat bahwa masyarakat yang ikut dalam kegiatan perencanaan di Desa Penarah termasuk dalam kategori dewasa yang berumur 20-30 Tahun berjumlah 38 responden atau 40,43%, sedangkan yang berumur 31-40 tahun berjumlah 31 responden atau 32,98%, masyarakat yang berumur 41-50 tahun berjumlah 16 responden atau 17,02% dan sisanya yang

terakhir masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan yang berumur 51 tahun keatas berjumlah 9 responden atau 9,57%.

**Tabel V.2: Identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase(%)</b>
Laki-laki	68	72,34%
Perempuan	26	27,66%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** *Data olahan hasil penelitian 2012*

Dari tabel V.2 dapat terlihat jenis kelamin responden laki-laki berjumlah 68 responden atau 72,34% dan yang perempuan berjumlah 26 responden atau 27,66%.

**Tabel V.3: Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase(%)</b>
PNS	4	4,26%
Tani	56	59,6%
Nelayan	34	36,2%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** *Data olahan hasil Penelitian 2012*

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan pekerjaan dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun. Responden yang ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa Penarah dari golongan PNS berjumlah 4 responden atau 4,26%, sedangkan yang termasuk kedalam golongan Tani berjumlah 56 responden atau 59,6% dan yang terakhir adalah golongan Nelayan berjumlah 34 responden atau 36,2%.

**Tabel V.4: Identitas Responden berdasarkan tingkat pendidikan Responden di Desa Penarah Kec. Kunder Utara Kab. Karimun**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase(%)</b>
Sarjana	3	3,19%
Diploma	5	5,31%
SMA	36	38,3%
SMP	24	25,53%
SD	26	27,66%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** *Data olahan hasil penelitian 2012*

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat pendidikan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Penara Kecamatan Kunder Utara Kabupaten karimun yaitu, jumlah Responden yang berpendidikan Sarjana berjumlah 3 orang atau 3.19%, sedangkan responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 5 orang atau 5,31%, Responden yang berpendidikan SMA berjumlah 36 orang atau 38,3%, responden yang berpendidikan SMP berjumlah 24 orang atau 25,53% dan yang terakhir adalah jumlah Responden yang berpendidikan SD yang ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa Panarah berjumlah 26 orang atau 27,66%.

## **5.2 Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah.**

Perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bermanfaat. Pada saat ini telah digalakkan pembangunan yang merata diseluruh penjuru wilayah dari pusat sampai didesa terpencil.



Perencanaan pembangunan disetiap daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, namun juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

Sesuai dengan uraian diatas maka Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dalam perencanaan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat. Masalah sarana yang dimiliki merupakan salah satu masalah yang perlu ditangani oleh Desa Penarah yaitu bagaimana perencanaan pembangunan dapat menjadi sarana yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Aparatur pemerintah Desa penarah harus cepat tanggap dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Dalam perencanaan pembangunan hal-hal yang menyangkut kegiatan perencanaan pembangunan yang bermasalah harus diselesaikan dengan baik.

Berikut ini dipaparkan tanggapan responden berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Desa Penarah berdasarkan kuisioner yang disebarkan sebagai berikut:

### **5.2.1 Perencanaan pembangunan dari aspek partisipatif**

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi semua pihak, baik pemerintah Desa maupun partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dilihat dari suatu keberhasilan perencanaan pembangunan desa maka dalam hal ini perangkat desa harus proaktif agar pembangunan Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun bisa berhasil guna.

Bedasarkan pernyataan diatas, maka dapat penulis mengartikan tentang perencanaan pembangunan Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil dari perencanaan pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya partisipasi masyarakat.

Partisipatif merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Desa Penarah Dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material.

Untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, maka dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat, masyarakat yang senantiasa menyampaikan pendapat, masyarakat yang selalu mengkeritik, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotongroyong dan masyarakat yang senantiasa memberi bantuan material atau benda.

Masyarakat yang senantiasa hadir jika diundang dalam rapat perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu hal yang mengisyaratkan bahwa dengan keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan yang tujuannya untuk mensinkronkan rencana

pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan di desa. Karena bila tidak demikian bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil tingkat partisipatif masyarakat dari aspek masyarakat yang hadir jika diundang dalam rapat perencanaan pembangunan.

**Tabel V. 5: Tanggapan Responden tentang kehadiran masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	9	9,57%
Setuju	45	47,87%
Cukup Setuju	27	28,72%
Kurang Setuju	13	13,83%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.5 diatas, maka 45 responden atau (47,87%) menganggap setuju, sedangkan 27 responden atau (28,72%) menganggap cukup setuju, berikutnya 13 responden atau (13,83%) menganggap kurang setuju dan sisanya 9 responden atau (9,57%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat peneliti analisis bahwa sebagian besar masyarakat Desa Penarah selalu hadir jika diundang oleh pemerintah Desa untuk rapat perencanaan pembangunan Desa Penarah. Walaupun

masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat hadir karena suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Untuk menghilangkan penasaran peneliti terhadap tanggapan responden mengenai masyarakat Desa Penarah yang hadir dalam rapat perencanaan pembangunan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara terbuka kepada salah satu Staf Desa Penarah yaitu Bapak Khaidir, beliau mengatakan:

*”sebenarnya masyarakat Desa Penarah sangat sedikit untuk hadir dalam rapat perencanaan pembangunan, alasan masyarakat Desa Penarah tidak dapat hadir dalam rapat perencanaan pembangunan karena masyarakat selalu sibuk dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Karena mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Penarah berkerja sebagai nelayan dan berkebun”.*(Wawancara, 2 September 2012).

Partisipatif masyarakat yang senantiasa menyampaikan pendapat dalam rapat. Partisipasi masyarakat dengan menyampaikan pendapat dalam rapat harus secara bebas tidak boleh dipengaruhi/ditekan oleh pihak luar untuk mengubah apalagi mempengaruhi sistem-sistem nilai-nilai yang mereka miliki, sebab keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan partisipasi masyarakat yang secara aktif dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil tingkat partisipatif masyarakat dari aspek kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada rapat perencanaan pembangunan desa penarah:

**Tabel V. 6: Tanggapan Responden tentang keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam rapat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	11	11,7%
Setuju	40	42,55%
Cukup Setuju	26	27,66%
Kurang Setuju	14	14,89%
Tidak Setuju	8	8,51%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.6 diatas, dapat dilihat bahwa 40 responden atau (42,55%) menganggap setuju, 26 responden atau (27,66%) menganggap cukup setuju, 14 responden atau (14,89%) menganggap kurang setuju, 11 responden atau (11,7%) menganggap sangat setuju. Dan sisanya 8 responden atau (8,51%) menganggap tidak setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini. Dari tabel diatas, maka dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang senantiasa menyampaikan pendapat dalam rapat perencanaan pembangunan termasuk dalam kategori setuju.

Selanjutnya partisipatif masyarakat yang senantiasa mengkritik kalau arah dan tujuan perencanaan pembangunan desa tidak benar. Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya sebatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi juga keterlibatan masyarakat untuk memberikan penilaian dan mengkritik terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat aparatur desa tidak benar atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena biar bagaimanapun yang merasakan suatu pembangunan bermanfaat atau tidak adalah masyarakat itu sendiri.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil tingkat partisipatif masyarakat dari aspek masyarakat yang selalu mengkritik kalau arah dan tujuan perencanaan pembangunan tidak benar:

**Tabel V.7: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang selalu mengkritik kalau arah perencanaan pembangunan tidak benar.**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	20	21,28%
Setuju	17	18,09%
Cukup Setuju	42	44,68%
Kurang Setuju	10	10,64%
Tidak Setuju	5	5,31%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V. 7 diatas terlihat bahwa tanggapan dari responden terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti adalah sebanyak 42 responden atau (44,68%) menganggap cukup setuju, 20 responden atau (21,28%) menganggap sangat setuju, 17 responden atau (18,09%) menganggap setuju, 10 responden atau (10,64%) menganggap kurang setuju dan sisanya 5 responden atau (5,31%) menganggap tidak setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah selaku responden dari penelitian ini.

Dari tabel diatas, maka dapat menunjukan mengenai masyarakat yang selalu mengkritik kalau arah dan tujuan perencanaan pembangunan Desa Penarah tidak benar termasuk dalam kategori cukup setuju. Adapun masyarakat yang selalu mengkritik kalau arah dan tujuan pembangunan Desa tidak benar rata-rata mereka adalah masyarakat yang memiliki jabatan atau tokoh masyarakat seperti RT, RW dan tokoh pemuda dalam masyarakat.

Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jabatan dalam kehidupan masyarakat, mereka takut kalau apa yang mereka keritik tidak sependapat dengan masyarakat yang lain. Hal ini pernah terjadi kepada Bapak Ismail Ali, beliau mengatakan:

*”Kemarin saya pernah mengkeritik perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, yaitu pemerintah Desa berencana untuk menyemenisasi jalan di Sungai Mata sedangkan jalan di sungai mata masih lebih bagus dibandingkan dengan jalan untuk menuju SMA N6 Kundur, tetapi banyak masyarakat yang di Sungai Mata tidak sependapat dengan saya, malahan sampe sekarang masyarakat yang di Sungai Mata kurang suka dengan saya hanya gara-gara maslah pendapat yang tidak sepaham(Wawancara, 5 September 2012)*

Partisipatif dari aspek masyarakat yang terlibat kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan Desa Penarah. Partisipasi dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat dipedesaan. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil tingkat partisipatif dari aspek masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa Penarah:

**Tabel V. 8: Tanggapan responde tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	24	25,53%

Setuju	46	48,94%
Cukup Setuju	21	22,34%
Kurang Setuju	3	3,19%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.8 diatas maka sebagian besar responden menganggap setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti yaitu 46 responden atau (48,94%), sedangkan 24 responden atau (25,53%) menganggap sangat setuju, berikutnya 21 responden atau (22,34%) menganggap cukup setuju dan sisanya 3 responden atau (3,19%) menganggap tidak setuju.

Dari tanggapan diatas, maka dapat diqnqlisis bahwa sebenarnya kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan Desa Penarah dari segi bantuan atau sumbangan tenaga mereka masih begitu kuat sifat kebersamaanya. Walaupun ada juga masyarakat yang tidak dapat ikut dalam kegiatan gotong royong karena ada hal-hal tertentu yang harus mereka utamakan seperti bagi kaum ibu-ibu mereka harus mengurus rumah tangga. Bagi yang bapak-bapak kadang mereka keluar daerah untuk belanja membeli barang-barang diwarungnya yang sudah habis agar nantinya dapat dijual.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terbuka yang peneliti ajukan kepada salah satu masyarakat Desa Penarah yaitu Bapak Ali yang kerja sampinganya adalah membuka usaha warung:

*" kadang-kadang saya tidak dapat ikut dalam gotong royong karena setiap 2 hari atau 3 hari sekali yang jelas setiap hari minggu saya harus ke Tg. Balai Karimun untuk belanja barang-barang yang sudah habis diwarung saya, salain itu juga kadang-kadang masyarakat banyak yang menitipkan pesanan kebutuhan mereka kepada saya. Jadi itulah kadang-kadang saya tidak dapat ikut dalam kegiatan gotong royong."*(wawancara, 5September 2012)



Partisipatif dari aspek masyarakat yang senantiasa memberikan bantuan material/benda dalam perencanaan pembangunan desa. Intinya adalah agar masyarakat memiliki jiwa tanggung jawab untuk meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya suatu usaha perencanaan pembangunan. Karena keberhasilan suatu perencanaan pembangunan tidak hanya peran dari aparat desa, melainkan juga peran partisipatif dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mau melibatkan diri dari proses perencanaan pembangunan desa.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil partisipatif dari aspek masyarakat yang memberikan bantuan material/benda dalam perencanaan pembangunan:

**Tabel V. 9: Tanggapan responden dalam memberikan bantuan material tentang perencanaan pembangunan**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	3	3,19%
Setuju	18	19,15%
Cukup Setuju	52	55,32%
Kurang Setuju	8	8,51%
Tidak Setuju	13	13,83%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.9 diatas terlihat bahwa sebagian responden Desa Penarah menganggap cukup setuju, yaitu 52 responden atau (55,32%), sedangkan 18respondenmenganggap setuju atau (19,15%), berikutnya 13 responden atau (13,83%) menganggap tidak setuju, sedangkan yang menganggap kurang setuju sebanyak 8 responden atau (8,51%) dan sisanya 3 responden atau (3,19%) menganggap sangat setuju dari pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat atau responden menganggap cukup setuju terhadap pernyataan tentang responden yang senantiasa memberikan bantuan material/benda dalam perencanaan pembangunan Desa Penarah. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung untuk membantu dari segi material/benda dalam perencanaan pembangunan Desa Penarah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terbuka yang peneliti ajukan kepada salah satu masyarakat Desa Penarah, yaitu Bapak Zainuddin, beliau mengatakan:

*”rata-rata kami disini hanya bisa memberikan sumbangan berupa tenaga, tetapi kalau bantuan berupa uang atau material lainnya kami rasa kami tidak bisa karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami saja masih kurang”.*(wawancara, 7 September 2012)

Dari kelima pertanyaan yang peneliti ajukan. Maka dibawah ini peneliti akan memaparkan hasil rekapitulasi dari aspek partisipatif terhadap perencanaan pembangunan Desa Penarah:

**Tabel V. 10: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah**

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	
1	Masyarakat yang hadir jika diundang dalam rapat	9	45	27	13	-	94
		9,57%	47,87%	28,72%	13,83%	-	100%
2	Masyarakat yang menyampaikan pendapat dalam rapat	11	40	26	14	8	94
		11,7%	42,55%	27,66%	14,89%	8,51%	100%
3	Masyarakat yang Mengkritik perencanaan pembangunan jika tidak benar	20	17	42	10	5	94
		21,28%	18,09%	44,68%	10,46%	5,31%	100%
4	Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong	24	46	21	3	-	94
		25,53%	48,94%	22,34%	3,19%	-	100%

<b>5</b>	Memberi bantuan material/benda	3	18	52	8	13	94
		3,19%	19,15%	55,32%	8,51%	13,83%	100%
	<b>Total</b>	94	166	168	48	26	502
		18,73%	33,07%	33,47%	9,56%	5,18%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- CS : Cukup Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju

Pada tabel rekapitulasi V.10 diatas, dari lima buah pernyataan yang diajukan peneliti kepada para responden yaitu masyarakat Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, maka 168 responden atau (33,47%) menganggapcukup setuju, 166reponden atau (33,07%)menganggapsetuju, 94 responden atau (18,73%) menganggapsangat setuju, 48 responden atau (9,56%) menganggapkurang setuju dan sisanya 26 responden atau (5,18%) menganggap tidak setuju. Ini berarti bahwa sesuai dengan indikator peneliti tentang partisipatif termasuk dalam kategori cukup baik.

Hanya saja partisipasi masyarakat selalu mengkritik kalau arah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak benar dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan material/barang masih termasuk dalam kategori cukup setuju. Salah satu faktor penyebab dari masyarakat yang kurang kritis kalau arah dan tujuan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa Penarah tidak benar adalah faktor pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kalau penyebab lemahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan material/benda karena faktor ekonomi atau pendapatan

masyarakat masih begitu lemah. Masyarakat rata-rata pendapatan mereka sehari-hari dari berkerja menjadi nelayan atau tani.

### **5.2.2 Perencanaan pembangunan dari aspek keberpihakan pada masyarakat Desa Penarah**

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat karena setiap perencanaan yang dibuat tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dari definisi diatas dapat penulis mengartikan bahwa perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin Desa Penarah benar-benar sangat dibutuhkan yang tujuannya untuk mensinkronkan antara perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa tersebut.

Untuk mengetahui gambaran tentang keberpihakan pada masyarakat, maka dapat dilihat dari tingkat masyarakat yang merasa kalau perencanaan pembangunan berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, perencanaan pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat,

perencanaan pembangunan selalu mewakili aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan selalu mendukung ekonomi masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat desa harus berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin karena desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Selain itu juga perencanaan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu perencanaan pembangunan desa masih perlu penyesuaian-penyesuaian dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat desa berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Penarah:

**Tabel V.11: Tanggapan reponden tentang keberpihakan perencanaan pembangunan terhadap masyarakat miskin**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	6	6,38%
Setuju	24	25,53%
Cukup Setuju	43	45,74%
Kurang Setuju	21	22,34%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.11 diatas, dapat dianalisis bahwa sebagian besar responden menganggap cukup setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti tentang perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu sebanyak 43 responden atau (45,74%) menganggap cukup setuju, sedangkan 24 responden atau (25,53%) menganggap setuju

berikutnya 21 responden atau (22,34%) menganggap kurang setuju dan sisanya 6 responden atau (6,38%) menganggap sangat setuju.

Dari tabel diatas, maka dapat dianalisis bahwa pemerintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan masih belum berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Penarah. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menganggap setuju atas perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa yang berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terhadap masyarakat yang menjawab setuju kalau perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin adalah masyarakat yang tinggal satu lingkungan dengan kepala Desa yaitu masyarakat yang ada di jalan Sungai Mata, karena masyarakat di situ memang pembangunanya lebih bagus jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di tempat lainya seperti di Daerah Sungai Lumut, Bukit Kepong dan dan Seberas.

Berdasarkan hasil wawancara terbuka yang peneliti ajukan kepada salah satu masyarakat Desa Penarah yaitu bapak Sabtu, beliau mengatakan:

*“Seharusnya pemerintah Desa harus menyediakan pasar, agar masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Tg. Balai Karimun untuk belanja membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan uang yang kami gunakan untuk ongkos pergi ke Tg. Balai Karimun bisa kami gunakan untuk kebutuhan yang lainya”.*(Hasil wawancara, 7 September 2012)

Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sebab perencanaan pembangunan di pedesaan bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi masyarakat yang kokoh, mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan dengan langkah meningkatkan

kuwalitas tenaga kerja, meningkatkan kemampuan aparatur desa dan mengembangkan sarana dipedesaan yang tujuanya adalah untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa Penarah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat:

**Tabel V.12: Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan yang memperngaruh terhadap pendapatan masyarakat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	10	10,64%
Setuju	34	36,17%
Cukup Setuju	24	25,53%
Kurang Setuju	19	20,21%
Tidak Setuju	7	7,45%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.12 diatas, maka dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan masyarakat ini terbukti yang menganggap setuju sebanyak 34 responden atau (36,17%), yang menganggap cukup setuju sebanyak 24 responden atau (25,53%), yang menganggap kurang setuju sebanyak 19 responden atau (20,21%), yang menganggap sangat setuju sebanyak 10 responden atau (10,64%) dan yang sisanya menganggap tidak setuju sebanyak 7 responden atau (7,45%).

Berdasarkan tanggapan diatas maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat Desa Penarah menganggap setuju kalau perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa berpengaruh terhadap sumber pendapatan

masyarakat. Walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang setuju terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Berdasarkan pengamatan saya di lapangan kalau perencanaan pembangunan yang dibuat oleh perangkat Desa berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya penimbunan jalan di sungai mata, pembangunan MCK dan penimbunan lapangan bola kaki. Ini semua perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penarah.

Kebijakan aparatur desa harus mewakili aspirasi masyarakat, sebab perencanaan pembangunan yang sepenuhnya harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dalam proses penyusunannya juga harus benar-benar melibatkan aspirasi masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai kehidupan baru yang lebih baik, melalui langkah-langkah perencanaan pembangunan. Maka dari itu aparatur desa harus mampu menampung aspirasi atau keinginan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa selalu mewakili aspirasi masyarakat Desa Penarah:

**Tabel V.13: Tanggapan responden tentang kebijakan pemerintah Desa selalu mewakili aspirasi masyarakat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	17	18,09%
Cukup Setuju	58	61,7%
Kurang Setuju	14	14,89%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>



Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.13 diatas terlihat bahwa sebagian masyarakat Desa Penarah menganggap cukup setuju sekitar 58responden atau (61,7%), 17responden atau (18,09%) menganggap setuju, 14 responden atau (14,89%)menganggap tidak setuju, dan sisanya 5responden atau (5,32%) menganggap sangat setuju.Dari pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah selaku responden dari penelitian ini.

Berdasarkan tanggapan diatas maka dapat menunjukan bahwa masyarakat menganggap cukup setuju kalau perencanaan yang dibuat oleh aparatur Desa selalu mewakili aspirasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang dibuat aparatur desa harus bisa mendukung ekonomi masyarakat sebab tujuan dari perencanaanPembangunan di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat, mencapai kondisi sosial dan bisa mendukung ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin agar menjadi lebih baik.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa sangat mendukung ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Penarah:

**Tabel V.14: Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan yang mendukung ekonomi masyarakat miskin**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	4	4,26%
Setuju	19	20,2%
Cukup Setuju	55	58,5%
Kurang Setuju	26	27,7%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.14 diatas terlihat bahwa sebagian masyarakat menganggap cukup setuju terhadap perencanaan pembangunan yang mendukung ekonomi masyarakat hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yaitu sebanyak 55 responden atau (58,5%) menganggap cukup setuju, sedangkan 26 responden atau (27,7%) menganggap kurang setuju, berikutnya 19 responden atau (20,2%) menganggap setuju dan sisanya 4 responden atau (4,26%) menganggap sangat setuju.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden diatas, maka dapat menunjukkan kalau masyarakat Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun menganggap cukup setuju kalau perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa penarah sangat mendukung ekonomi masyarakat. Kebanyakan masyarakat yang menjawab cukup setuju dan kurang setuju terhadap perencanaan pembangunan sangat mendukung ekonomi masyarakat adalah masyarakat yang mayoritas kerja menjadi nelayan karena mereka lebih fokus kelaut menjadi nelayan. Bagi masyarakat yang menjawab setuju dan sangat setuju terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa sangat mendukung ekonomi masyarakat adalah masyarakat yang mayoritas berkerja menjadi guru, pegawai kantor Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terbuka dengan salah satu bapak Zainuddin yang setiap harinya berkerja sebagai nelayan, beliau mengatakan: *“jujur saya pribadi tidak merasakan kalau perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa berpihak pada diri saya, buktinya program Rumah Tidak Layak Huni yang saya dapatkan belum terealisasi hingga saat ini”*.(wawancara, 10 September 2012)

Dari keempat pertanyaan yang peneliti ajukan. Maka dibawah ini peneliti akan memaparkan hasil rekapitulasi dari aspek perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat desa berpihak pada masyarakat Desa Penarah:

**Tabel V.15: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap perencanaan pembangunan Desa penarah berpihak pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.**

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	
1	Perencanaan pembangunan berpihak pada masyarakat miskin	6	24	43	21	-	94
		6,38%	25,53%	45,74%	22,34%	-	100%
2	Perencanaan pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin	10	34	24	19	7	94
		10,64%	36,17%	25,53%	20,21%	7,45%	100%
3	Kebijakan pemerintah selalu mewakili aspirasi masyarakat	5	17	58	14	-	94
		5,32%	18,09%	61,7%	14,89%	-	100%
4	Perencanaan pembangunan sangat mendukung ekonomi masyarakat miskin	4	19	55	26	-	101
		4,26%	20,2%	58,5%	27,7%	-	100%
	Total	25	94	180	80	7	386
		6,48%	24,4%	46,6%	20,7%	1,81%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- CS : Cukup Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju

Pada tabel rekapitulasi V.15 diatas, dari empat buah pernyataan yang diajukan peneliti kepada para responden, maka sebanyak 180 responden atau (46,6%) menganggap cukup setuju, sedangkan 94 responden atau (24,4%) menganggap setuju, berikutnya 80 responden atau (20,7%) menganggap

kurangsetuju, 25responden atau (6,48%) menganggap sangat setuju dan sisanya 7 responden atau (1,81%) menganggap tidak setuju.

Dari tanggapan yang diberikan oleh responden, mengenai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh perangkat Desa Penarah masih belum berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang belum terealisasi hingga saat ini yaitu:

- a. Rumah tidak layak huni.
- b. Pembangunan gedung TPQ.
- c. Pembangunan Posyandu dan
- d. Pasar Desa.

Dari uraian diatas, maka dapat menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa. Diantaranya masalah perencanaan pembangunan rumah tak layak huni (RTLH), perencanaan pembangunan Gedung TPQ dan perencanaan pembangunan gedung Posyandu. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu masukan dan saran dari masyarakat pemerintah Desa Penarah tidak pernah menyikapi dengan serius.

### **5.2.3 Perencanaan pembangunan dari aspek keterbukaan**

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah adanya asas transparansi atau keterbukaan. Syarat ini adalah mutlak mengingat dalam alam demokrasi saat ini masyarakat berhak mengetahui secara lebih spesifik, konsep dan penerapan kebijakan macam apa yang dapat segera diwujudkan dan

sekaligus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi hajat hidup masyarakat itu sendiri. Karenanya disisi lain tertutupan aparatur pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam pembangunan akan berdampak pada kurang efektifnya penerapan kebijakan dan terhambatnya proses perencanaan pembangunan yang akan dijalankan. Sehingga boleh jadi tertutupan justru menimbulkan resistensi di masyarakat

Terbuka merupakan proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa, jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penarah.

Dari uraian diatas dapat penulis mengartikan bahwa keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi perencanaan pembangunan, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara lebih spesifik terhadap konsep dan penerapan kebijakan seperti apa yang dapat segera diwujudkan dan sekaligus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Karenanya disisi lain tertutupan aparatur desa dalam memutuskan suatu kebijakan atas perencanaan pembangunan akan berdampak pada kurang efektifnya penerapan kebijakan dan terhambatnya proses pembangunan yang dijalankan. Sehingga boleh jadi tertutupan justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, khususnya aparatur di Desa Penarah.

Untuk mengetahui gambaran tentang keterbukaan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, maka dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap RPJMDes tahun 2011-2015, informasi perencanaan pembangunan fisik desa, sumber dana yang diperoleh dan dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan desa.

Masyarakat yang mengetahui secara langsung terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/(RPJMDes) tahun 2011-2015. Dengan pengetahuan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur desa dan masyarakat pun akan mempunyai rasa memiliki terhadap perencanaan pembangunan tersebut.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari tingkat keterbukaan pemerintah desa dari aspek masyarakat yang mengetahui secara langsung terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2011-2015.

**Tabel V.16: Tanggapan responden tentang pengetahuan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dari Tahun 2011-2015**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	3	3,19%
Setuju	8	8,51%
Cukup Setuju	26	27,7%
Kurang Setuju	46	48,9%
Tidak Setuju	11	11,7%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.I6 diatas terlihat bahwa sebagian masyarakat menganggap kurang setuju terhadap Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa(RPJMDes) dari tahun 2011-2012 hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menganggapkurang setuju berjumlah 46 respondenatau (48,9%), sedangkan 26 responden atau (27,7%) menganggap cukup setuju, berikutnya 11 responden atau (11,7%) menganggap tidak setuju, 8 responden atau (8,51%) menganggap setuju dan sisanya 3 responden atau (3,19%) menganggapsangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Dari tanggapan diatas maka dapat menunjukan bahwa sebagian besar responden atau masyarakat Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara kabupaten Karimun merasa kurang setuju untuk pengetahuanya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dari tahun 2011-2015.

Masyarakat yang mengetahui informasi perencanaan pembangunan fisik yang disampaikan oleh pemerintah desa. Dengan pengetahuan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik desa berarti masyarakat dapat mengetahui program perencanaan pembangunan desa dan bisa mengevaluasi kinerja aparatur desa.Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat dapat tumbuh dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat diselesaikan.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik desa yang disampaikan oleh aparatur desa.

**Tabel V.17: Tanggapanresponden tentang pengetahuan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik Desa**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	19	20,2%
Cukup Setuju	31	33%

Kurang Setuju	49	52,1%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.17 diatas maka dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti adalah sebanyak 49 responden atau (52,1%) menganggap kurang setuju, 31 responden atau (33%) menganggap cukup setuju, 19 responden atau (20,2%) menganggap setuju dan sisanya 5 responden atau (5,32%) menganggap sangat setuju.

Dari tanggapan diatas, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat merasa kurang setuju terhadap informasi perencanaan pembangunan fisik Desa Penarah. Hal ini merupakan salah satu faktor keberhasilan dari perencanaan pembangunan fisik Desa Penarah.

Masyarakat mengetahui terhadap sumber dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan fisik desa. Keterbukaan masalah dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan fisik desa merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi perencanaan pembangunan hal ini mengingat Negara kita menganut sistem demokrasi maka dari itu masyarakat berhak mengetahui secara lebih spesifik terhadap masalah dana yang masuk dan sekaligus bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi hajat hidup masyarakat itu sendiri. Karena disisi lain ketertutupan aparat desa terhadap masalah dana yang masuk akan berdampak kurang efektifnya penerapan kebijakan dan terhambatnya proses perencanaan pembangunan yang akan dijalankan. Sehingga boleh jadi ketertutupan justru menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.



Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan fisik desa.

**Tabel V.18: Tanggapan responden tentang pengetahuan masyarakat terhadap dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan fisik Desa**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	8	8,51%
Cukup Setuju	20	21,3%
Kurang Setuju	44	46,8%
Tidak Setuju	17	18,1%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari pernyataan yang diajukan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa sebanyak 44 responden atau (46,8%) responden menganggap kurang setuju, 20 responden atau (21,3%) menganggap cukup setuju, 17 responden atau (18,1%) menganggap tidak setuju, 8 responden atau (8,51%) menganggap setuju dan sisanya 5 responden atau (5,32%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Dari keterangan tabel diatas maka dapat menunjukan bahwa masyarakat merasa kurang setuju untuk mengetahui secara langsung terhadap sumber dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan fisik Desa Penarah.

Dan yang terakhir adalah masalah keterbukaan aparatur desa terhadap masalah dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan fisik desa. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri dari pemerintahan yang baik, sebab aparatur yang baik tidak hanya dilihat dari profesionalitas, pelayanan yang prima, demokrasi, efisiensi dan efektifitas, melainkan juga bisa dilihat dari transparansi

atau sifat keterbukaan terhadap masalah dana untuk perencanaan pembangunan, dengan adanya sifat keterbukaan akan menumbuhkan kembangkan rasa kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat setempat.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap masalah dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan fisik desa:

**Tabel V.19: Tanggapan responden tentang jumlah dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan fisik Desa**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	3	3,19%
Setuju	6	6,38%
Cukup Setuju	20	21,3%
Kurang Setuju	51	54,3%
Tidak Setuju	14	14,9%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari pernyataan yang diajukan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa sebanyak 51 responden atau (54,3%) menganggap kurang setuju, 20 responden atau (21,3%) menganggap cukup setuju, 14 responden atau (14,9%) menganggap tidak setuju, 6 responden atau (6,38%) menganggap setuju dan sisanya 3 responden atau (3,19%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Penarah sebagai responden dari penelitian ini.

Dari keterangan tabel diatas, maka peneliti dapat menunjukan bahwa masyarakat merasa kurang setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan mengenai pengetahuan masyarakat secara langsung terhadap dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan fisik Desa penarah. hal ini tentu saja bisa menjadi faktor penghambat dari keberhasilan perencanaan pembangunan

karena masyarakat Desa Penarah kurang begitu yakin terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa.

Dari keempat pertanyaan yang peneliti ajukan. Maka dibawah ini peneliti akan memaparkan hasil rekapitulasi dari aspek keterbukaan aparatur desa terhadap perencanaan pembangunan di Desa Penarah:

**Tabel V.20: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keterbukaan pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan fisik Desa**

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	
1	Pengetahuan masyarakat terhadap RPJMDes dari Tahun 2011-2012	3	8	26	46	11	94
		3,19%	8,51%	27,7%	48,9%	11,7%	100%
2	Pengetahuan masyarakat terhadap informasi perencanaan pembangunan fisik Desa	5	19	31	49	-	94
		5,32%	20,2%	33%	52,1%	-	100%
3	Pengetahuan masyarakat terhadap dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan Desa	5	8	20	44	17	94
		5,32%	8,51%	21,3%	46,8%	18,1%	100%
4	Pengetahuan masyarakat terdapat dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan Desa	3	6	20	51	14	94
		3,19%	6,38%	21,3%	54,3%	14,9%	100%
	Total	16	41	97	190	42	386
		4,15%	10,6%	25,1%	49,2%	10,9%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- CS : Cukup Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju

Pada tabel rekapitulasi V.20 diatas, dari empat buah pernyataan yang diajukan peneliti kepada para responden yaitu masyarakat Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, bahwa 190 responden atau

(49,2%) menganggap kurang Setuju, 97 responden atau (25,1%) menganggap cukup setuju, 42 responden atau (10,6%) menganggap tidak setuju, 41 responden atau (10,6%) menganggap setuju dan sisanya 16 responden atau (4,15%) menganggap sangat setuju.

Ini berarti masyarakat Desa Penarah kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun menilai bahwa sikap keterbukaan pemerintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan masih termasuk kategori kurang baik.

Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Desa Penarah masih begitu banyak merasa kurang mengetahui terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa, baik itu dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dari tahun 2011-2015, dana yang diperoleh untuk perencanaan pembangunan Desa, dan dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan Fisik Desa. Itu semua merupakan faktor terpenting yang harus diketahui oleh masyarakat Desa Penarah agar perencanaan pembangunan Desa tidak ada timbul rasa kecurigaan antara masyarakat terhadap pemerintah. Atau rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.

Hal ini juga sesuai dengan tanggapan responden dari kuesioner terbuka yang dibuat oleh peneliti yang menanyakan tentang pendapat mereka terhadap keterbukaan pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa. Adapun sebagian besar menilai bahwa membuat suatu perencanaan pembangunan tidak transparan proses penyelenggaraanya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga masyarakat Desa Penarah yaitu Bapak Abdul Barik:

*“Saya merasa bahwa perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa tidak transparan terhadap proses penyelenggaraanya, saya pribadi tidak tahu berapa Dana yang masuk dan berapa dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan”.*(wawancara, 7 September 2012).

#### **5.2.4 perencanaan pembangunan dari aspek kecermatan**

Aparatur desa merupakan fungsi pengatur bagi masyarakatnya, maka dari itu aparatur desa harus cermat dan mengetahui terhadap kondisi atau keadaan penduduknya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakatnya maka aparatur desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam keputusan dan tindakan. Jika aparatur desa tidak mengetahui kondisi masyarakat maka bisa saja terjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

kecermatan merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.

Dari uraian diatas, maka dapat penulis menyimpulkan tentang kecermatan aparaturdesa penarah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu harus memahami apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan dan apa yang perlukan oleh masyarakat. Agar perencanaan dalam pembangunan desa yang sudah ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar di

hadapan masyarakat. Dan masyarakat bisa memberikan kepercayaanya kepada aparaturnya desa penarah.

Untuk mengetahui gambaran kecermatan aparaturnya desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, maka dapat dilihat dari tingkat ketelitian aparaturnya desa dalam membuat perencanaan pembangunan, sering datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam membuat perencanaan pembangunan dan aparaturnya desa sering memperbaiki jika terjadi penyimpangan dalam perencanaan pembangunan.

Yang pertama dilihat dari ketelitian pemerintah desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan. Ketelitian aparaturnya desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan sangat diperlukan yang tujuannya untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat, serta sekaligus perencanaan pembangunan yang dibuat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri.

Tabel dibawah ini memaparkan tingkat ketelitian aparaturnya desa dalam membuat perencanaan pembangunan.

**Tabel V.21: Tanggapan responden tentang ketelitian pemerintah Desa dalam membuat perencanaan pembangunan Desa**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	4	4,26%
Setuju	9	9,57%
Cukup Setuju	56	59,6%
Kurang Setuju	25	20,6%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.21 diatas, maka 56 responden atau (59,6%) menganggap cukup setuju, 25 responden atau (20,6%) menganggap kurang setuju, 9 responden atau (9,57%) menganggap setuju dan sisanya 4 responden atau (4,26%) menganggap sangat setuju dari pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden masyarakat Desa Penarah.

Dari tanggapan diatas maka, dapat dianalisis bahwa masyarakat Desa Penarah menganggap kalau ketelitian pemerintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan masih termasuk dalam kategori cukup atau masih belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Desa Penarah.

Selanjutnya adalah masalah aparaturnya desa sering datang kelokasi tempat perencanaan pembangunan. Dengan melakukan pemantauan dilokasi perencanaan pembangunan, maka hasilnya akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

Tabel dibawah ini memaparkan tingkat kecermatan aparaturnya Desa Penarah dari aspek aparaturnya desa sering datang kelokasi tempat perencanaan pembangunan:

**Tabel V.22: Tanggapan responden tentang pemerintah Desa sering datang kelokasi perencanaan pembangunan**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	4	4,26%
Setuju	9	9,57%
Cukup Setuju	54	57,4%
Kurang Setuju	27	28,7%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel V.22 diatas, maka 54 responden atau (57,4%) menganggap cukup setuju, 27 responden atau (28,7%) yang menganggap kurang setuju, 9 responden atau (9,57%) menganggap setuju dan sisanya 4 responden atau (4,26%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Dari tanggapan diatas maka dapat dianalisis bahwa pemerintah desa masih termasuk dalam kategori cukup atau masih belum sesuai dengan harapan masyarakat untuk datang kelokasi tempat perencanaan pembagunan. Tetapi setelah peneliti melakukan pertanyaan terbuka tentang pemerintah Desa yang sering datang kelokasi perencanaan pemabngunan, maka tanggapan masyarakat memang jarang pemerintah Desa datang kelokasi perencanaan pembangunan Desa Penarah.

Masalah aparatur desa tidak pernah melakukan penyimpangan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak akan terjadi penyimpangan jika didalam diri aparatur memiliki sifat malu, bertanggung jawab terhadap jabatan yang dia pegang dan mau menjaga kepercayaan atau amanat yang diberikan oleh masyarakat terhadapnya.

Tabel dibawah ini memaparkan tingkat kecermatan aparatur desa dari aspek aparatur desa tidak pernah melakukan penyimpangan dalam membuat perencanaan pembangunan Desa Penarah:

**Tabel V.23: Tanggapan responden tentang pemerintah Desa tidak pernah melakukan penyimpangan dalam membuat perencanaan pembangunan.**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	3	3.19%
Setuju	8	8,51%
Cukup Setuju	12	12,8%



Kurang Setuju	52	55,3%
Tidak Setuju	19	20,2%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.23 diatas terlihat bahwa 52 responden atau (55,3%) menganggap kurang setuju, 19 responden atau (20,2%) menganggap tidak setuju, 12 responden atau (12,8%) menganggap cukup setuju, 8 responden atau (8,51%) menganggap setuju dan sisanya 3 responden atau (3,19% ) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden.

Dari tanggapan yang diberikan oleh responden, maka dapat dianalisis bahwa perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa sering terjadi penyimpangan, Yang sering terjadi penyimpangan bukan perencanaan yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama melainkan yang sering terjadi penyimpangan adalah masalah dana. Banyak perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan Dana, misalnya Rumah Tak Layak Huni(RTLH) pemerintah Kabupaten Karimun mengeluarkan dana dari APBD untuk merehab 1 rumah berjumlah 20 Juta Rupiah, tetapi kenyataanya masyarakat hanya mendapatkan uang sebesar 16, 5 juta. Sehingga timbulah masalah yaitu banyak rumah yang belum siap untuk direnovasi hingga saat ini.

Dan yang terakhir adalah masyarakat yang merasa kalau terjadi penyimpangan terhadap perencanaan pembangunan, pemerintah desa selalu memperbaiki. Agar perencanaan pembangunan tidak terjadi penyimpangan maka dari itu aparat desa harus menyusun berbagai kebijaksanaan, anataralain dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, pembinaan generasi muda, pembinaan

golongan ekonomi lemah dan perencanaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari kecermatan aparaturnya dari aspek pemerintah desa selalu memperbaiki jika perencanaan pembangunan terjadi penyimpangan:

**Tabel V.24: Tanggapan responden tentang pemerintah Desa selalu memperbaiki jika terjadi penyimpangan dalam perencanaan pembangunan**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	3	3,19%
Setuju	7	7,45%
Cukup Setuju	51	54,3%
Kurang setuju	20	21,3%
Tidak Setuju	13	13,8%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.24 diatas terlihat bahwa 51 responden atau (54,3%) masyarakat yang menganggap cukup setuju, 20 responden atau (21,3%) menganggap kurang setuju, 13 responden atau (13,8%) menganggap tidak setuju, 7 responden atau (7,45%) menganggap setuju dan sisanya 3 responden atau (3,19%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat menganggap cukup setuju terhadap pemerintah Desa yang selalu memperbaiki jika terjadi penyimpangan dalam perencanaan pembangunan.

Dari keempat pertanyaan yang peneliti ajukan. Maka dibawah ini peneliti akan menggambarkan hasil rekapitulasi dari aspek keterbukaan aparatur desa terhadap perencanaan pembangunan di Desa Penarah:

**Tabel V.25: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap kecermatan pemerintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan**

No	Indikator Pernyataan	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1	Ketelitian pemerintah Desa dalam membuat perencanaan pembangunan	4	9	56	25	-	94
		4,26%	9,57%	59,6%	20,6%	-	100%
2	Pemerintah Desa sering datang kelokasi perencanaan pembangunan	4	9	54	27	-	94
		4,26%	9,57%	57,4%	28,7%	-	100%
3	Pemerintah Desa tidak pernah melakukan penyimpangandalam perencanaan pembangunan	3	8	12	52	19	94
		3,19%	8,51%	12,8%	55,3%	20,2%	100%
4	Pemerintah Desa selalu memperbaiki jika terjadi penyimpangan	3	7	51	20	13	94
		3,19%	7,45%	54,3%	21,3%	13,8%	100%
	Total	14	33	173	124	32	376
		3,72%	8,78%	46%	33%	8,51%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- CS : Cukup Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju

Pada tabel rekaptulasi V.25 diatas, dari lima buah pernyataan yang diajukan peneliti kepada para responden maka sebanyak 124 responden atau (33%)menganggap kurang setuju, 173 responden atau (46%) menganggap cukup setuju, 33 responden atau (8,78%) menganggap setuju, 32 responden atau (8,51%)

menganggap tidak setuju dan sisanya 14 responden atau (3,72%) menganggap sangat setuju.

Dari tanggapan diatas maka dapat menunjukan bahwa kecermatan pemerintah Desa Penarah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan masih belum sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh masyarkat Desa Penarah. Adapun hal-hal yang dinggap menjadi penyebab kurang cermatnya pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan menurut bapak Jali selaku Staf Pegawai Desa adalah:

*“yang menjadi penyebab kurang cermatnya kami selaku pemerintah Desa adalah yang pertama Keterbatasan sarana untuk mendapatkan informasi dari Kabupaten/Propinsi jika kami ingin mengetahui tentang pembangunan Desa kami terpaksa harus ke Karimun dulu menyebrang dengan menggunakan kapal dan yang ke dua Kerbatasan failitas sarana yang ada di kantor Desa seperti Komputer.”*(10 September 2012).

#### **5.2.5 Perencanaan pembangunan dari aspek Efisiensi dan Efektif**

Perencanaan pembangunan yang efisiensi dan Efektif merupakan suatu perencanaan pembangunan yang dibuat untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan, persoalan dan menjawab semua kebutuhan yang ada dimasyarakat, dengan cara menentukan sejauh mana proses perencanaan pembangunan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan yang ada di pedesaan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Efisiensi dan efektif, yaitu mempunyai makna bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan

sarana dan prasarana kedepanya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan aparaturdesa harus memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan produksi dan distribusi dipedesaan yang mengatas namakan masyarakat dari berbagai keterbelakangan dan kemiskinan.

Untuk mengetahui gambaran perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur desa bersifat efisiensi dan efektif, maka hal ini dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana di Desa Penarah memadai, memiliki potensi untuk mengembangkan sarana dan prasarana kedepanya, selalu tepat waktu dalam pembuatan dan selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Masyarakat yang merasa kalau perencanaan pembangunan di Desa penarah memadai. Secara umum sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang tinggal dipedesaan. Untuk itu keberadaan sarana dan prasarana di pedesaan hendaknya dikelola dengan sungguh-sungguh agar senantiasa selalu siap pakai guna membantu tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan, baik itu berupa sarana dan parasarana pendidikan, kesehatan dan pembangunan untuk menunjang ekonomi masyarakat.

Tabel dibawah ini akan memaparkan masyarakat yang merasa kalau Desa Penarah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

**Tabel V.26: Tanggapan responden tentang sarana dan prasarana di Desa Penarah memadai.**

Kategori Jawaban	Responden	%
Sangat Setuju	4	4,26%
Setuju	8	8,51%
Cukup Setuju	53	56,4%

Kurang Setuju	29	30,9%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel penelitian V.26 diatas maka, 53 responden atau (56,4%) menganggap cukup setuju, 29 responden atau (30,9%) menganggap kurang setuju, 8 responden atau (8,51%) menganggap setuju dan sisanya 4 responden atau (4,26%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun merasa bahwa sarana dan prasarana di Desa Penarah masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para warga yang putus sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Hal ini merupakan salah satu penyebab sarana dan prasarana di Desa Penarah kurang memadai karena sumber daya manusia (SDM) masih lemah.

Selanjutnya adalah potensi untuk mengembangkan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana kedepanya. Dalam pengembangan potensi dalam bidang sarana dan prasarana didesa harus disesuaikan dengan karakteristik desa itu sendiri seperti fasilitas untuk pengembangembangan yang mampu mendukung pemberdayaan rumah tangga masyarakat, peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM), pengembangan akses informasi dan promosi produk dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari masyarakat yang merasa kalau Desa Penarah memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana kedepanya:

**Tabel V. 27 Tanggapan responden tentang potensi pembangunan Desa Penarahmemadai dalam bidang sarana dan prasarana kedepanya**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	11	11,7%
Cukup setuju	51	54,3%
Kurang Setuju	27	28,7%
Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel V.27 diatas maka, 51 responden atau (54,3%) menganggapcukup setuju, 27 responden atau (28,7%) menganggapkurang setuju, 11 responden atau (11,7%) menganggap setuju dan sisanya 5 responden atau (5,32%) menganggap sangat setuju terhadap pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden masyarakat Desa Penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil tanggapan dari responden, maka dapat dianalisis, bahwa sebagian masyarakat menggap kalau Desa Penarah masih lemah dalam mengembangkan potensi pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana kedepanya. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan fisik Desa dari Rumah, jalan dan sarana pendidikan yang masih begitu lemah dan belum memadai.

Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparaturnya desa harus tepat waktu dalam pembuatannya, karena perencanaan pembangunan desa yang tepat waktu dalam pembuatannya merupakan suatu pedoman dan ketentuan yang dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparaturnya desa selalu tepat waktu dalam pembuatannya:

**Tabel V.28: Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan selalu tepat waktu dalam pembuatannya**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	5	5,32%
Setuju	7	7,47%
Cukup Setuju	24	25,5%
Kurang Setuju	56	59,6%
Tidak Setuju	2	2,13%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan pada tabel V.28 diatas, maka 56 responden (59,6%) menganggap kurang setuju, 24 responden atau (25,5%) menganggap cukup setuju, 7 responden atau (7,47%) menganggap setuju, 5 responden atau (5,32%) menganggap sangat setuju dan sisanya 2 responden atau (2,13%) menganggap tidak setuju.

Berdasarkan tanggapan dari responden mengenai pernyataan yang peneliti ajukan, maka sebagian besar masyarakat merasa kurang setuju apabila perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa Penarah selalu tepat waktu. Hal ini tentu saja memengaruhi perkembangan dan pembangunan khususnya di Desa Penarah.

Dan yang terakhir adalah masalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparaturnya desa harus tepat waktu dalam penyelesaiannya. Maka dari itu



aparatur desa dituntut untuk meningkatkan kinerja agar tujuan perencanaan pembangunan yang dirumuskan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Karena keberhasilan perencanaan yang tepat waktu dalam penyelesaian merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Tabel dibawah ini akan memaparkan hasil dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur desa selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya:

**Tabel V.29: Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Responden</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	2	2.13%
Setuju	4	4,26%
Cukup Setuju	29	30,9%
Kurang Setuju	51	54.3%
Tidak Setuju	8	8,51%
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari pernyataan yang diajukan oleh peneliti, maka tanggapan responden dapat dilihat pada tabel V.29 diatas. Berdasarkan tabel diatas dapatdilihat bahwa sebanyak 51 responden atau (54,3%) menganggap kurang setuju, 29 responden atau (30,9%) menganggap cukup setuju, 8 responden atau (8,51%) menganggap tidak setuju, 4 responden atau (4,26%) menganggapsetuju dan sisanya 2 responden atau (2,13%) menganggapangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti kepada masyarakat desa penarah yang menjadi responden dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat Desa Penarah menganggap kurang setuju kalau perencanaan pembangunan yang dibuat

oleh pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terbuka yang dilakukan oleh peneliti kepada responden masyarakat Desa Penarah, yaitu ibu Munawarah:

*Pemreintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan selalu tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya, misalnya tentang Rumah Tak Layak Huni(RTLH) dan penimbunan jalan di Sungai mata. Yang menjadi kendala menurut saya tidak hanya dana, tetapi juga keaktupan perangkat Desa baik itu dari pemantauanya kelokasi perencanaan pembangunan dan mau menerima aspirasi atau pendapat masyarakat.*

Dari keempat pertanyaan yang peneliti ajukan. Maka dibawah ini peneliti akan memaparkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari aspek aparatur desa dalam membuat perencanaan pembangunan bersifat efektif dan efisiensi:

**Tabel V.30 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap efektif dan efisiensi Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun**

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	
1	Sarana dan prasarana Desa memadai	4	8	53	29	-	94
		4,26%	8,51%	56,4%	30,9%	-	100%
2	Desa Penarah memiliki potensi untuk mengembangkan sarana dan prasarana kedepanya	5	11	51	27	-	94
		5,32%	11,7%	54,3%	28,7%	-	100%
3	Perencanaan pemabangunan tepat waktu dalam pembuatanya	5	7	24	56	2	94
		5,32%	7,47%	25,5%	59,6%	2,13%	100%
4	Perencanaan pembangunan tepat waktu dalam penelesaiannya	2	4	29	51	8	94
		2,13%	4,26%	30,9%	54,3%	8,51%	100%
	Total	16	30	157	163	10	376
		4,26%	7,98%	41,8%	43,4%	2,66%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2012

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- CS : Cukup Setuju
- KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

Pada tabel rekapitulasi pada tabel rekapitulasi V.30 diatas dapat disimpulkan bahwa, dari empat buah pernyataan yang diajukan oleh peneliti maka 163 responden atau (43,4%) menganggap kurang setuju, 157 responden atau (41,8%) menganggap cukup setuju, 30 responden atau (7,98%) menganggap setuju, 16 responden atau (4,26%) menganggap sangat setuju dan sisanya 10 responden atau (2,66%) menganggap tidak setuju.

Dari tanggapan responden diatas, maka peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun masih belum bisa untuk mengembangkan potensi sarana dan prasarana kedepanya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bapak Saiful Amin selaku masyarakat Desa Penarah yaitu:

*“Desa Penarah bisa mengembangkan sarana dan Prasarana kedepanya dengan syarat yang pertama tingkatkan kualitas pendidikan kususnya anak-anak yang kurang mampu agar sumber daya manusia atau (SDM) berkualitas, yang kedua perencanaan pembangunan yang dibuat harus tepat waktu dalam pembuatan dan penyelesaiannya dan yang terakhir perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan kebutuhan pemimpin semata.”*(wawancara, 10 September 2012)

Semoga Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun bisa mengembangkan sarana dan prasarana kedepanya, sehingga masyarakat Desa Penarah bisa menikmati dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh perangkat Desa.

Dibawah ini akan peneliti paparkan hasil dari rekapitulasi tanggapan responden terhadap perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun:

**Tabel: 31 Rekapitulasi jawaban responden tentang analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

No	Indicator	Pengukuran					Jumlah
	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	
1	Perencanaan pembangunan dari aspek Partisipatif	94	166	168	48	26	502
		18,73%	33,07%	33,47%	9,56%	5,18%	100%
2	Perencanaan pembangunan dari aspek keberpihakan pada masyarakat	25	94	180	80	7	386
		6,48%	24,4%	46,6%	20,7%	1,81%	100%
3	Perencanaan pembangunan dari aspek keterbukaan	16	41	97	190	42	386
		4,15%	10,6%	25,1%	49,2%	10,9%	100%
4	Perencanaan pembangunan dari aspek kecermatan	14	33	173	124	32	376
		3,72%	8,78%	46%	33%	8,51%	100%
5	Perencanaan pembangunan dari aspek Efisiensi dan Efektif	16	30	157	163	10	376
		4,26%	7,98%	41,8%	43,4%	2,66%	100%
	<b>Total</b>	165	364	775	605	117	2026
		8,14%	18%	38,3%	29,9%	5,77%	100%

Sumber: *DataOlahan hasil penelitian 2012*

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

CS : Cukup Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

Untuk lebih mudahnya dalam persentase tersebut, maka digunakan skor yaitu:

Yang menjawab A dengan bobot 5

Yang menjawab B dengan bobot 4

Yang menjawab C dengan bobot 3

Yang menjawab D dengan bobot 2

Yang menjawab E dengan bobot 1

A: SS : Sangat Setuju

B: S : Setuju

C: CS : Cukup Setuju

D: KS : Kurang Setuju

E: TS : Tidak Setuju

Persentase rekapitulasi hasil angket Analisis perencanaan pembangunan di

Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun adalah:

1. Untuk alternatif jawaban nilai A =  $5 \times 165 = 825$
2. Untuk alternatif jawaban nilai B =  $4 \times 364 = 1456$
3. Untuk alternatif jawaban nilai C =  $3 \times 775 = 2325$
4. Untuk alternatif jawaban nilai D =  $2 \times 605 = 1210$
5. Untuk alternatif jawaban nilai E =  $1 \times 117 = 177$

---

$$2026 = 5993$$

Nilai yang diharapkan adalah:

$$5 \times 2026 = 10130$$

Selanjutnya digunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$F = 5993$$

$$N = 10130$$

$$P = \frac{5993}{10130} \times 100\%$$

$$P = 59,16 \%$$

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah persentase analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten karimun, dengan ukuran:

1. 81% - 100% tergolong sangat setuju
2. 61% - 80% tergolong setuju
3. 41% - 60% tergolong cukup setuju
4. 21% - 40% tergolong kurang setuju
5. 20% kebawah tergolong tidak setuju

Berdasarkan pada tabel V.31 diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun termasuk dalam kategori **Cukup Setuju**. Hal ini berdasarkan jumlah evaluasi rata-rata berada pada ukuran 41%-60%.

### **5.3 Faktor-faktor yang memperngaruhi perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kec. Kundur Utara Kab. Karimun**

Perencanaanpembangunan di pedesaan memegang peranan penting, sebab desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan pada hakikatnya pembangunan di pedesaan sangat berhubungan erat dengan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat bahwa banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah adalah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program

kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 56) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari :

- a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.  
Dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap jumlah biaya yang masuk untuk perencanaan pembangunan masih termasuk dalam kategori kurang setuju, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menjawab kurang setuju berjumlah 44 responden atau 46,8%. Selanjutnya pengetahuan masyarakat terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan desa penarah termasuk dalam kategori kurang setuju, ini terbukti dari tanggapan responden yang menjawab kurang setuju berjumlah 51 responden atau 54,3%. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana di desa penanarah masih termasuk dalam kategori cukup setuju, ini terbukti dari tanggapan responden yang menjawab cukup setuju berjumlah 53 responden atau 56,4%.
- b. Waktu pelaksanaanya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.  
Perencanaan pembangunan desa penarah dilihat dari waktu pembuatanya termasuk dalam kategori kurang setuju, ini terbukti dari tanggapan responden yang menjawab kurang setuju berjumlah 56 responden atau 59,6%. Sedangkan waktu penyelesaiannya termasuk dalam kategori kurang setuju, ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menjawab kurang setuju berjumlah 51 responden atau 54,3%.
- c. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat termasuk dalam kategori cukup setuju, ini terbukti dari tanggapan responden yang menjawab cukup setuju berjumlah 43 responden atau 45,74%.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6. I Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan.

Bahwa analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun dikategorikan **“Cukup Setuju”**, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 157 responden atau sekitar 7,40%, sedangkan responden yang menyatakan setuju berjumlah 388 atau sekitar 18,29%, berikutnya responden yang menyatakan cukup setuju berjumlah 814 atau 38,38%, responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 645 atau 30,41% dan yang terakhir responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 117 atau 5,52%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil riset analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun dinyatakan **“Cukup Setuju”**.

#### **6.2 Saran**

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi kantor Desa Penarah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun dan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, diharapkan kedepannya akan lebih baik dalam mensukseskan pembangunan di desa penarah.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Agar perencanaan pembangunan di Desa Penarah bisa berjalan dengan baik maka dari itu pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus saling

berkerja sama, karena keberhasilan suatu pembangunan adalah peran dari kita semua baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

2. Sebelum pemerintah Desa menetapkan suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu harus melihat apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat, agar masyarakat bisa percaya terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat. Dan pemerintah Desa harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan bukan menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pembangunan.
3. Diharapkan kedepanya pemerintah desa semakin terbuka terhadap apa-apa yang direncanakan baik itu RPJMDes, dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan agar masyarakat bisa tahu dan tidak curiga terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah desa.
4. Semoga pemerintah desa cermat dalam membuat suatu keputusan dalam perencanaan pembangunan karena dengan cermatnya pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan akan menciptakan suatu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
5. Semoga kedepanya desa penarah memiliki potensi dalam mengembangkan sarana dan prasarana baik itu dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nopri. 2004. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Uir Pres.
- Gunawan, Markus. 2007. *Provinsi Kepulauan Riau. Batam*. Titik Cahaya Elka.
- Guza, Afnil. 2008. *Himpunan Peraturan Desa Kelurahan kecamatan*. Jakarta, Asa Mandiri.
- Hanafi, Mahduh M. 2004. *Pengantar Manajemen*. UIR Press,
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Juliana, Devi dan Raja Raudhah. 2009. *Sekilas Kisah Tentang Pulau Belat*. Penarah, dYKd Aksara Mandiri.
- Manullang, 2004, *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Reneka cipta
- Pamudi, S. Himawan, dkk. 2003. *Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta. Lappera pustaka utama.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance dalam rangka Otonomi Daerah: upaya membangun Organisasi Efektifitas dan Efisiensi melalui Restrukrurisasi dan pemberdayaan*. Bandung, Mandar Jaya
- Soewito, MD, SH. 2007. *Himpunan Peraturan Pemerintah Tentang Desa dan Kelurahan*. Bandung. Nuansa Aulia
- Sondang, Siagian P, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Bina Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokomidjojo, Bintoro, 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Bandung, Mandar Maju.

Undang – Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wasistiono Sadu dan Tahrir Irwan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.

Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Yuliarti, yayuk dan mengku purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang “Desa”

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang “ Himpunan Peraturan Desa, Kelurahan dan Kecamatan”